



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bhayangkara Baru No.1, Demak

LAPORAN PENDAHULUAN

BELANJA JASA KONSULTANSI LAINNYA-JASA KONSULTANSI LINGKUNGAN

PENYUSUNAN KLHS RDTR KECAMATAN KARANGTENGAH



TAHUN ANGGARAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pendahuluan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2024-2044.

Laporan Pendahuluan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum Wilayah Perencanaan, Metodologi dan Kerangka Proses Pelaksanaan, serta Rencana Kerja.

Penyusunan Laporan Pendahuluan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah ini tentunya jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang membangun dari berbagai pihak terkait untuk menyempurnakan Laporan Pendahuluan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan perhatian dalam penyusunan Laporan Pendahuluan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tim Penyusun, 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-2
1.2.1. Maksud.....	I-2
1.2.2. Tujuan	I-2
1.3. RUANG LINGKUP	I-2
1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah	I-2
1.3.2. Ruang Lingkup Materi.....	I-2
1.4. TAHAPAN DAN METODE KLHS.....	I-3
1.4.1. Metode, Teknik, Rangkaian Langkah-Langkah Dan Hasil Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup;	I-3
1.4.2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program	I-8
1.4.3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	I-8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-8

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	II-1
2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	II-2
2.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.....	II-3

2.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	II-4
2.5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	II-5

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

3.1. KONDISI FISIK WILAYAH PERENCANAAN	III-1
3.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI	III-1
3.1.2 TOPOGRAFI DAN KLERENGAN	III-2
3.1.3 KLIMATOLOGI	III-3
3.1.4 GEOLOGI	III-8
3.1.5 KONDISI TANAH	III-8
3.1.6 KAWASAN RAWAN BENCANA	III-9
3.1.7 KAWASAN HIDROGEOLOGI DAN DAS	III-13
3.1.8 PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	III-18
3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA WILAYAH PERENCANAAN	III-20
3.2.1 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK	III-20
3.2.2 KEPADATAN PENDUDUK	III-21
3.2.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK	III-22
3.2.4 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA DAN DEPENDENCY RATIO	III-23
3.2.5 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN	III-26
3.2.6 PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN	III-27
3.2.7 PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN	III-28
3.2.8 PENDUDUK MENURUT AGAMA	III-28
3.2.9 KONDISI KEMISKINAN	III-28
3.2.10 KONDISI SOSIAL BUDAYA	III-29
3.3. KONDISI EKONOMI WILAYAH PERENCANAAN	III-30
3.3.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	III-30
3.3.2 POTENSI EKONOMI WILAYAH	III-31
3.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH PERENCANA	III-34
3.4.1 KONDISI SARANA WILAYAH	III-34
3.4.2 KONDISI PRASARANA WILAYAH	III-43

BAB IV

METODOLOGI DAN KERANGKA PROSES PELAKSANAAN

4.1. METODOLOGI PROSES PELAKSANAAN KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN

KARANGTENGAHIV-1

4.2. METODE PENGUMPULAN DATAIV-3

4.2.1. SURVEI PRIMERIV-3

4.2.2. SURVEI SEKUNDER.....IV-3

4.3. METODE ANALISISIV-4

4.3.1. PERUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTANIV-4

4.3.2. KETERKAITAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM (KRP) DENGAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTANIV-6

4.3.3. ANALISIS KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG TERDAMPAKIV-7

4.3.4. PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAMIV-8

4.3.5. PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM YANG MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....IV-9

4.3.6. PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHSIV-9

4.3.7. VALIDASI KLHSIV-10

BAB V

RENCANA KERJA

5.1. TAHAPAN PELAKSANAANV-1

5.2. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN.....V-2

5.3. KELUARAN DAN PELAPORAN.....V-4

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1 Contoh Matrik Penilaian dan Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dengan Kriteria Isu Pembangunan Prioritas	I-4
Tabel 1.2 Contoh Matrik Uji Silang dalam Proses Penapisan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup	I-5
Tabel 1.3 Contoh Matrik Uji Silang dalam Analisis Pengaruh Materi Muatan KRP dengan Isu PB Prioritas	I-6

BAB III

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-1
Tabel 3.2. Kondisi Topografi di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-2
Tabel 3.3. Kelerengan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-2
Tabel 3.4. Curah Hujan dan Luas Lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-3
Tabel 3.5. Kondisi Geologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-8
Tabel 3.6. Jenis Tanah di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-8
Tabel 3.7. Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-9
Tabel 3.8. Kondisi Hidrogeologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-13
Tabel 3.9. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-13
Tabel 3.10. Luas Tutupan Lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-18
Tabel 3.11. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-20
Tabel 3.12. Kepadatan Penduduk Bruto Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-21
Tabel 3.13. Perhitungan Kepadatan Netto Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-22
Tabel 3.14. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019-2023	III-22
Tabel 3.15. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023	III-24
Tabel 3.16. Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-25
Tabel 3.17. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	III-26
Tabel 3.18. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Mata Pencarian	III-27
Tabel 3.19. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	III-28
Tabel 3.20. Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Agama Tahun 2019 – 2023	III-28
Tabel 3.21. Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Karangtengah Tahun 2023	III-29
Tabel 3.22. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	III-30
Tabel 3.23. Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ku) Tanaman Sayur di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023	III-31

Tabel 3.24. Luas Panen (m2) dan Produksi (Kg) Tanaman Biofarmaka di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023	III-32
Tabel 3.25. Produksi (Kg) Buah-buahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023	III-32
Tabel 3.26. Luas Panen (m2) dan Produksi (Ton) Perkebunan di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023	32
Tabel 3.27. Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021 - 2023	33
Tabel 3.28. Jumlah Populasi Unggas (Ekor) di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021 - 2023	33
Tabel 3.29. Sebaran Industri Kawasan Perkotaan Karangtengah	33
Tabel 3.30. Jumlah Ketersediaan Sarana Pendidikan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021	34
Tabel 3.31. Jumlah Ketersediaan Sarana Peribadatan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021	35
Tabel 3.32. Jumlah Ketersediaan Sarana Kesehatan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021	39
Tabel 3.33. Jumlah Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021	41
Tabel 3.34. Ketersediaan Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Karangtengah	43
Tabel 3.35. Ketersediaan Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Karangtengah	44
Tabel 3.36. Pengguna Listrik Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021	45
Tabel 3.37. Ketersediaan Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Perkotaan Karangtengah	48
Tabel 3.38. Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021 ..	49
Tabel 3.39. Jumlah Pelanggan Pemakaian Air Minum pada Perumda Air Minum Kabupaten Demak Tahun 2020	52

BAB IV

Tabel 4.1. Kebutuhan Data KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah	IV-3
Tabel 4.2. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan	IV-5
Tabel 4.3. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	IV-5
Tabel 4.4. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	IV-6
Tabel 4.5. Keterkaitan KRP dengan Isu Strategis	IV-6
Tabel 4.6. Muatan Kajian KLHS	IV-7

BAB V

Tabel 5. 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah	V-3
--	-----

DAFTAR GAMBAR

BAB III

Gambar 3.1. Peta Delineasi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-4
Gambar 3.2. Peta Topografi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-5
Gambar 3.3. Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-6
Gambar 3.4. Peta Curah Hujan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-7
Gambar 3.5. Peta Geologi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-10
Gambar 3.6. Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-11
Gambar 3.7. Peta Rawan Bencana Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-12
Gambar 3.8. Peta Hidrogeologi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-15
Gambar 3.9. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-16
Gambar 3.10. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-17
Gambar 3.11. Peta Tutupan Lahan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-19
Gambar 3.12. Grafik Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-20
Gambar 3.13. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 – 2023	III-23
Gambar 3.14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2019-2023	III-24
Gambar 3.15. Piramida Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023	III-26
Gambar 3.16. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	III-27
Gambar 3.17. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Karang Tengah	III-30
Gambar 3.18. PDRB Kabupaten Demak Tahun 2019-2023	III-31
Gambar 3.19. Kondisi Sarana Pendidikan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-35
Gambar 3.20. Kondisi Sarana Peribadatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-36
Gambar 3.21. Peta Sebaran Sarana Pendidikan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-37
Gambar 3.22. Peta Sebaran Sarana Peribadatan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-38
Gambar 3.23. Kondisi Sarana Kesehatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-40
Gambar 3.24. Kondisi Sarana Perdagangan dan Jasa di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-41
Gambar 3.25. Peta Sebaran Sarana Kesehatan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-42
Gambar 3.26. Kondisi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-44
Gambar 3.27. Peta Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-46
Gambar 3.28. Peta Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-47
Gambar 3.29. Peta Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-50
Gambar 3.30. Peta Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Karangtengah	III-51

BAB IV

Gambar 4.1. Metodologi Proses Pelaksanaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah	IV-2
--	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 dan PP No. 46/ 2016 tentang KLHS pasal 2, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Makna strategis mengandung arti sangat penting dan berpengaruh, karena komponen yang sangat penting dan berpengaruh tersebut jika dibiarkan akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan strategis yang digunakan dalam Kebijakan, Rencana dan/ atau Program dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi dimasa depan, merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 ayat 3 UU no 32 Tahun 2009 PPLH dan Pasal 1 ayat 3 PP 46 Tahun 2016 tentang KLHS).

Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS kedalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak berencana melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2024 - 2044. Hal ini untuk memastikan bahwa kedepan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pembangunan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah.

1.2.2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memberikan masukan dan memperbaiki rancangan rumusan kebijakan, rencana dan/atau program dalam dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi Kawasan Perkotaan Karangtengah yang terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan dengan luas kurang lebih 8979,61 ha. Adapun kelurahan yang masuk dalam wilayah perencanaan antara lain:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Kelurahan Pidodo | • Kelurahan Wonokerto |
| • Kelurahan Donorejo | • Kelurahan Wonowoso |
| • Kelurahan Grogol | • Kelurahan Rejosari |
| • Kelurahan Ploso | • Kelurahan Wonoagung |
| • Kelurahan Pulosari | • Kelurahan Dukun |
| • Kelurahan Karangsari | • Kelurahan Kedunguter |
| • Kelurahan Karantowo | • Kelurahan Batu |

1.3.2. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah sesuai dengan PP No 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Dalam pasal 6, menyebutkan pembuatan dan pelaksanaan KLHS melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4. TAHAPAN DAN METODE KLHS

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:

1.4.1. Metode, Teknik, Rangkaian Langkah-Langkah Dan Hasil Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup;

A. Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

- a. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara:
Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan dikumpulkan dari telaah literatur dan curah pendapat Kelompok Kerja.
- b. Memusatkan isu-isu pembangunan berkelanjutan
Pemusatan isu-isu pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kesamaan substansi dan/atau telaahan sebab-akibat yang dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - isu lintas sektor
 - isu lintas wilayah
 - isu lintas pemangku kepentingan
 - isu lintas waktu

Hasil pemusatan isu-isu pembangunan berkelanjutan dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan.

B. Identifikasi dan Perumusan Isu PB strategis

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis dilakukan dengan cara menapis hasil isu-isu pembangunan berkelanjutan hasil FGD 1 dengan unsur-unsur pada PP 46/2016 Pasal 9 (1), yaitu:

1. Telaah karakteristik wilayah
2. Telaahan tingkat potensi dampak dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indikasi cakupan wilayah;
 - b. frekuensi dan/atau intensitas.
3. Telaah keterkaitan antara isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara analisis sebab akibat atau analisis sejenis lainnya.
4. Telaah materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan cara pemetaan lokasi dan/atau analisis potensi pengaruh.
5. Telaah muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara analisis keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan dengan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Telaah hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada hierarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau dilakukan dengan cara analisis keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan dengan hasil KLHS dimaksud.

Hasil telaahan isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis. Hasil konsultasi menjadi dasar telaahan pada tahap identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permen LH dan Kehutanan no 69 tahun 2017 pasal 20 bahwa penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis dan prioritas didasarkan pada hasil telaahan terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

C. Identifikasi dan Perumusan Isu PB Prioritas

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas diperoleh dengan cara menapis hasil isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis dengan unsur-unsur pada Pasal 9 (2), yaitu:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
- e. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
- i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
- j. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Daftar isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara penilaian (*scooring*). Hasil penilaian menetapkan paling sedikit tiga isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

Tabel 1.1.
Contoh Matrik Penilaian dan Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dengan Kriteria Isu Pembangunan Prioritas

No	Isu Strategis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jml	Peringkat	Penentuan Isu PB Prioritas

Keterangan: Materi

penilaian:

- A. Kapasitas daya dukung dan daya tampung
- B. Perkiraan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup
- C. Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- D. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
- E. Status mutu dan ketersediaan SDA
- F. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

- G. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- H. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin
- I. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
- J. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional

Keterangan:

- 1 Tidak berpengaruh
- 2 Kurang berpengaruh
- 3 Berpengaruh
- 4 Sangat berpengaruh

D. Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dari dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Karangtengah. Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan cara uji silang antara materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dengan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Hasil uji silang dijadikan dasar untuk analisis pengaruh materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.

Tabel 1.2.

Contoh Matrik Uji Silang dalam Proses Penapisan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup

No	Materi Muatan KRP	Kriteria Dampak/resiko LH							Ket
		1	2	3	4	5	6	7	
1	KRP 1	-	-	-	+	-	+	+	< 4 tdk perlu KLHS
2	KRP 2	-	-	+	+	+	-	+	>= 4 perlu KLHS
3	KRP 3	-	-	+	+	+	+	+	> 4 perlu KLHS

Ket:

- = berdampak negatif terhadap lingkungan hidup
- + = berdampak positif terhadap lingkungan hidup
- 1. Perubahan iklim;
- 2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- 3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
- 4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- 5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- 6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

E. Analisis Pengaruh Hasil Identifikasi Materi Muatan KRP Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Analisis pengaruh dilakukan dengan cara menguji keterkaitan antara materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program dengan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Hasil analisis pengaruh dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman hasil analisis pengaruh.

Tabel 1.3.
Contoh Matrik Uji Silang dalam Analisis Pengaruh Materi Muatan KRP dengan Isu PB Prioritas

Materi Muatan KRP	Isu Prioritas			Jumlah pengaruh negatif	Ringkasan
	Isu PB 1	Isu PB 2	dst		
KRP yang perlu KLHS 1	-	-	+	2 pengaruh negatif	Perlu kajian muatan
KRP yang perlu KLHS 2	-	-	-	3 pengaruh negatif	Perlu kajian muatan
KRP yang perlu KLHS 3	-	+	+	1 pengaruh negatif	Tdk Perlu kajian

Ket:

- + = materi muatan KRP berpengaruh positif terhadap isu PB prioritas
- = materi muatan KRP berpengaruh negatif terhadap isu PB prioritas
- 0 = materi muatan KRP tidak berpengaruh terhadap isu PB prioritas

F. Kajian Muatan KLHS

Hasil kajian paling sedikit memuat kajian:

1. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan:

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan.

Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah.

Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.

2. Perkiraan Mengenai Dampak Dan Risiko Lingkungan Hidup:

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi *Environmental Risk Assessment*).

3. Kinerja Layanan Atau Jasa Ekosistem:

- Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terdiri atas:
- Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll.

- Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
- Layanan/fungsi budaya (*cultural services*): Ekosistem memberikan manfaat nonmaterial yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian.

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam:

- Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara:
- Mengukur kesesuaian antara tingkat kebutuhan dan ketersediaannya
- Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang
- Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi.

5. Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim:

Kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan dengan cara:

- Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim
- Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim
- Menentukan prioritas pilihan aksi adaptasi perubahan iklim.

6. Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara:

- Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi:
 - a. Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi
 - b. Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya
 - c. Pemeliharaan dan pengembangbiakan
 - d. Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya
 - e. Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya
 - f. Mengkaji ekosistem, yang meliputi: Interaksi jenis tumbuhan dan satwa
 - g. Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung
 - h. Mengkaji genetik, yang meliputi Keberlanjutan sumber daya genetik
 - i. Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

1.4.2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program

Pada tahapan ini dilakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program berdasarkan hasil analisis. Hasil analisis menghasilkan beberapa alternatif yang perlu dilakukan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan besaran manfaat dan risiko. Hasil analisis lanjutan dipilih berdasarkan manfaat yang lebih besar dan dapat dilaksanakan. Hasil analisis lanjutan yang mempunyai risiko lebih besar dan tidak ada alternatif lain, maka wajib dilakukan upaya mitigasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam hal hasil analisis lanjutan terdapat lebih dari satu alternatif yang mempunyai nilai manfaat lebih besar dan dapat dilaksanakan, maka pemilihan alternatif dilakukan dengan analisis sistem. Hasil analisis dapat dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dapat berupa:

- Perubahan tujuan atau target;
- Perubahan strategi pencapaian target;
- Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan resiko Lingkungan Hidup.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4.3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Memuat antara lain:

- Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- Dan/atau informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang pekerjaan; maksud dan tujuan; ruang lingkup pekerjaan, tahapan dan metodologi KLHS dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Kebijakan

Bab ini berisikan berisikan tinjauan dan kajian kebijakan terkait UU penataan ruang, UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini menguraikan gambaran umum wilayah perencanaan meliputi kondisi fisik dan administrasi wilayah perencanaan, kondisi kependudukan dan sosial budaya wilayah perencanaan, kondisi ekonomi wilayah perencanaan, dan kondisi sarana dan prasarana wilayah perencanaan.

BAB IV Metodologi dan Kerangka Proses Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang metodologi proses pelaksanaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis dalam kajian lingkungan hidup strategis RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2024-2044.

BAB V Rencana Kerja

Bab ini berisi mengenai rencana kerja Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah dilaksanakan selama 45 hari kalender. Dalam penyusunannya diperlukan rencana kerja sehingga dalam prosesnya menjadi efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan salah satunya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan wajib KLHS. Pelaksanaan penataan ruang menjelaskan perencanaan tata ruang menghasilkan: (Pasal 14).

- a. Rencana umum tata ruang, terdiri dari:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota
- b. Rencana rinci tata ruang, terdiri dari:
 - Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional
 - Rencana Tata Ruang kawasan strategis provinsi
 - Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota

Pasal 17 menyatakan peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai.

Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan: (pasal 34)

- a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
- b. Standar kualitas lingkungan
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sedangkan penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: (pasal 48)

- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;

- c. konservasi sumber daya alam;
- d. pelestarian warisan budaya lokal;
- e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 14 (empat belas) asas, antara lain adalah tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan **Pasal 15** Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS:

1. **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya**
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup

Adapun mekanisme KLHS sesuai dengan **pasal 15** Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan **Pasal 16** Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa:

1. Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
2. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan **Pasal 19** Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan penataan ruang bagian penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang, setiap pengolahan data dan analisis menggunakan teknik penentuan **daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup** melalui KLHS. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyusunan dan penetapan: (Pasal 3)

“rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota”

Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang meliputi: (Pasal 39)

- a. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- c. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
- d. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- e. penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, pengolahan data dan analisis setidaknya meliputi: (Pasal 32)

1. teknik analisis **daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup** yang ditentukan melalui **kajian lingkungan hidup strategis**; dan
2. teknik analisis keterkaitan antar wilayah kabupaten.

Sedangkan perumusan konsepsi rencana paling sedikit memperhatikan: (Pasal 35)

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. **daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**;
- e. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- f. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan **daya dukung lingkungan hidup** meliputi: (Pasal 51)

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

2.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, meliputi:

1. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - a. Perubahan iklim;
 - b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
2. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.
Penyelenggaraan KLHS sesuai dengan **Pasal 5** dilakukan dengan tahapan:
 1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
 3. Validasi KLHS.

Mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS sesuai dengan **Pasal 13** Permen LHK 69/2017 dapat dilakukan melalui:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan **Pasal 1** Permen LHK 69/2017 Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penyelenggaraan KLHS menurut **Pasal 2** Permen LHK 69/2017 meliputi:

1. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS;
2. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
3. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS;
4. Validasi KLHS; dan
5. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS.

Kebijakan, Rencana, dan/atau program tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (3)** terdiri atas:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
3. **Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;**
4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
7. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS sesuai dengan **Pasal 13** Permen LHK 69/2017 dapat dilakukan melalui:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan **Pasal 31** penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program. Penilaian mandiri dilaksanakan

dengan cara penilaian bertahap; dan/atau penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan mempertimbangkan:

1. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
2. Laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.

Permohonan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada **Pasal 36** dilengkapi dengan:

1. Surat permohonan;
2. Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS;
3. Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada **Pasal 35 ayat (2)** memuat informasi tentang:

1. Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
4. Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
8. Ringkasan eksekutif.

BAB III

GAMBARAN UMUM

WILAYAH PERENCANAAN

3.1. KONDISI FISIK WILAYAH PERENCANAAN

3.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI

Kawasan Perkotaan Karangtengah merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Demak yang memiliki ciri kekotaan atau memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai kawasan perkotaan. Delineasi Kawasan Perkotaan Karangtengah terdiri dari 14 desa/kelurahan dengan luas sebesar 4.220,93 Ha atau sekitar 81,90% dari total luas Kecamatan Karangtengah. Adapun batas-batas wilayah Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kecamatan Demak dan Wonosalam

Selatan : Kecamatan Guntur dan Karangawen

Barat : Kecamatan Karangtengah

Berikut ini adalah luas masing-masing desa/kelurahan yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.1.
Luas Wilayah Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Pidodo	288,42	6,83
2	Donorejo	428,71	10,16
3	Grogol	255,76	6,06
4	Ploso	170,16	4,03
5	Pulosari	227,41	5,39
6	Karangsari	223,35	5,29
7	Karangtowo	168,20	3,98
8	Dukun	365,06	8,65
9	Kedunguter	265,73	6,30
10	Batu	582,81	13,81
11	Wonokerto	310,40	7,35
12	Wonowoso	306,66	7,27

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	PERSENTASE (%)
13	Rejosari	230,36	5,46
14	Wonoagung	397,91	9,43
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	100,00

Sumber: Kecamatan Karangtengah Dalam Angka, 2024

3.1.2 TOPOGRAFI DAN KLERENGAN

Ketinggian lahan atau topografi merupakan jarak vertikal antara permukaan tanah dengan permukaan laut (elevasi) di suatu lokasi tertentu. Ketinggian ini biasanya diukur dalam meter atau kaki. Ketinggian lahan dapat mempengaruhi kualitas lahan dan kesesuaian lahan bagi tanaman tertentu. Kondisi ketinggian lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa ketinggian lahan <100 mdpl yang termasuk dalam klasifikasi rendah. Berikut ini adalah detail luasan ketinggian lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah berdasarkan desa/kelurahan.

Tabel 3.2.
Kondisi Topografi di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	TOPOGRAFI (Ha)	TOTAL
		<100 MDPL	
1	Pidodo	288,42	288,42
2	Donorejo	428,71	428,71
3	Grogol	255,76	255,76
4	Ploso	170,16	170,16
5	Pulosari	227,41	227,41
6	Karangsari	223,35	223,35
7	Karangtowo	168,20	168,20
8	Dukun	365,06	365,06
9	Kedunguter	265,73	265,73
10	Batu	582,81	582,81
11	Wonokerto	310,40	310,40
12	Wonowoso	306,66	306,66
13	Rejosari	230,36	230,36
14	Wonoagung	397,91	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	4.220,93

Sumber: RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024

Kelerengan merupakan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Kelerengan adalah perbandingan antara jarak vertikal dan jarak horizontal. Klasifikasi kelerengan di Kawasan Perkotaan Karangtengah didominasi oleh kelerengan 0-2% atau dalam kategori datar seluas total sebesar 2.793,31 Ha. Terdapat pula Desa Wonoagung dengan klasifikasi kelerengan 5-15% seluas 32,61 Ha. Berikut ini adalah tabel kelerengan Kawasan Perkotaan Karangtengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Kelerengan Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	KELERENGAN (Ha)			TOTAL
		0-2%	2-5%	5-15%	
1	Pidodo	229,28	59,14		288,42
2	Donorejo	307,58	121,13		428,71
3	Grogol	136,44	119,31		255,76
4	Ploso	103,00	67,16		170,16
5	Pulosari	157,26	70,14		227,41

NO	DESA/KELURAHAN	KELERENGAN (Ha)			TOTAL
		0-2%	2-5%	5-15%	
6	Karangsari	189,99	33,35		223,35
7	Karangtowo	101,3	66,9		168,2
8	Dukun	263,58	101,48		365,06
9	Kedunguter	183,47	82,26		265,73
10	Batu	324,6	258,2		582,8
11	Wonokerto	193,94	116,46		310,4
12	Wonowoso	176,27	130,38		306,66
13	Rejosari	141,77	88,59		230,36
14	Wonoagung	284,81	80,5	32,61	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		2.793,31	1.395,01	32,61	4.220,93

Sumber: Data Tematik RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024

3.1.3 KLIMATOLOGI

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah data selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Rata-rata curah hujan di Kawasan Perkotaan Karangtengah didominasi dengan curah hujan 1750-2250 mm/tahun. Sedangkan untuk desa dengan luasan paling besar yang terkena hujan adalah di Desa Batu yakni sebesar 582,81 Ha. Berikut ini adalah rincian luas dan sebaran curah hujan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

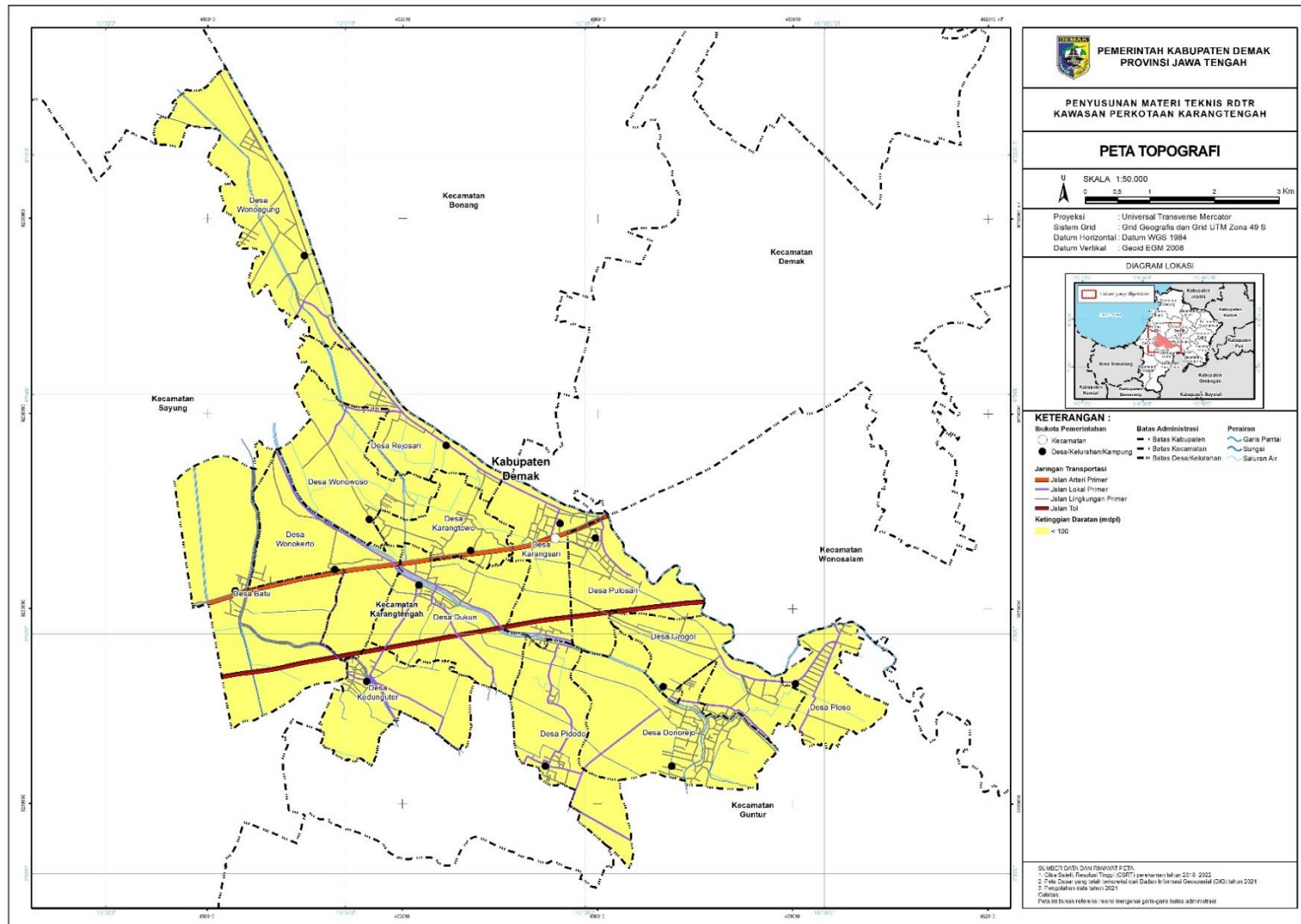
Tabel 3.4.
Curah Hujan dan Luas Lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	CURAH HUJAN (HA)	TOTAL
		1750-2250 MM/TAHUN	
1	Pidodo	288,42	288,42
2	Donorejo	428,71	428,71
3	Grogol	255,76	255,76
4	Ploso	170,16	170,16
5	Pulosari	227,41	227,41
6	Karangsari	223,35	223,35
7	Karangtowo	168,2	168,2
8	Dukun	365,06	365,06
9	Kedunguter	265,73	265,73
10	Batu	582,8	582,8
11	Wonokerto	310,4	310,4
12	Wonowoso	306,66	306,66
13	Rejosari	230,36	230,36
14	Wonoagung	397,91	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	4.220,93

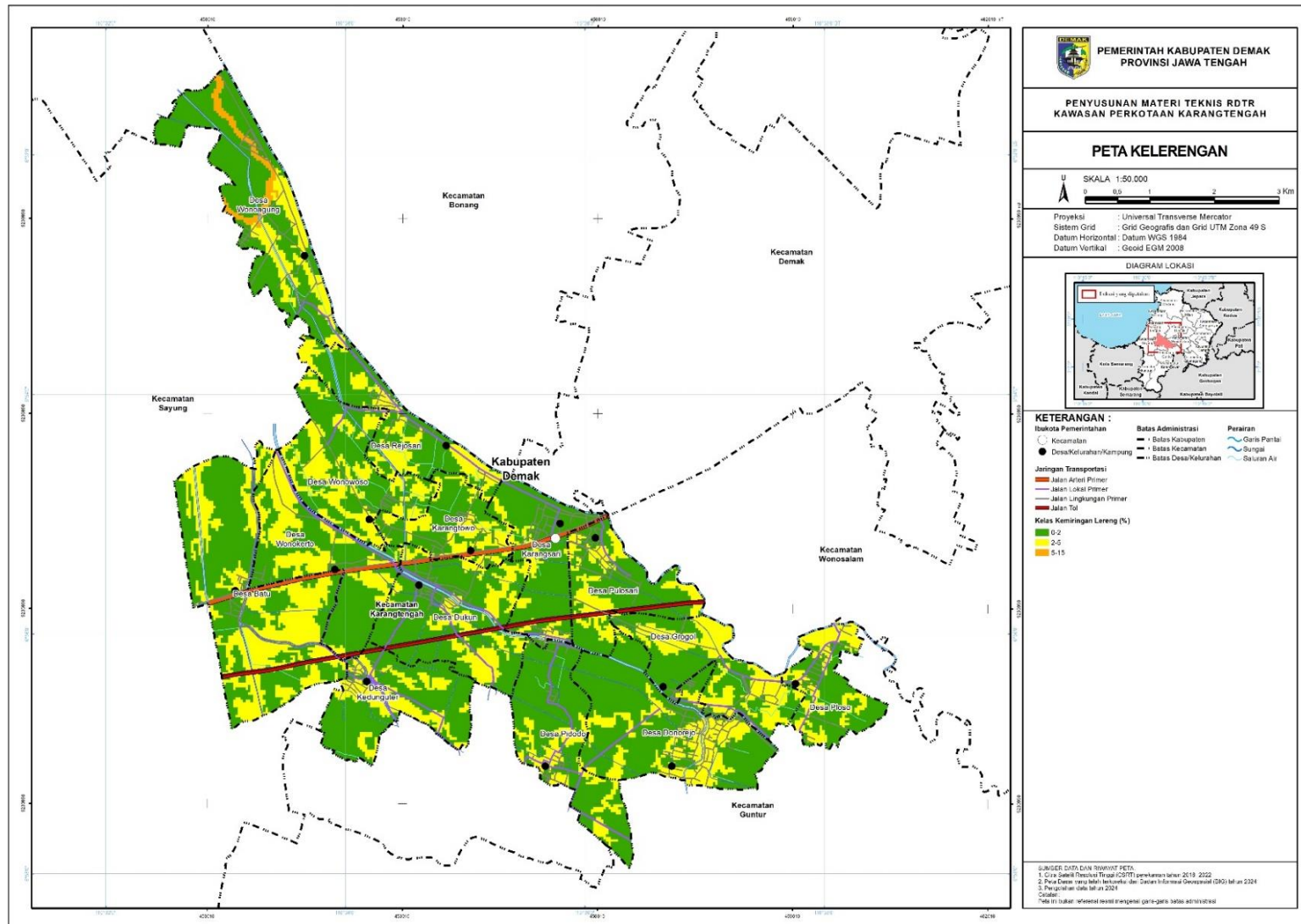
Sumber: Data Tematik RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024



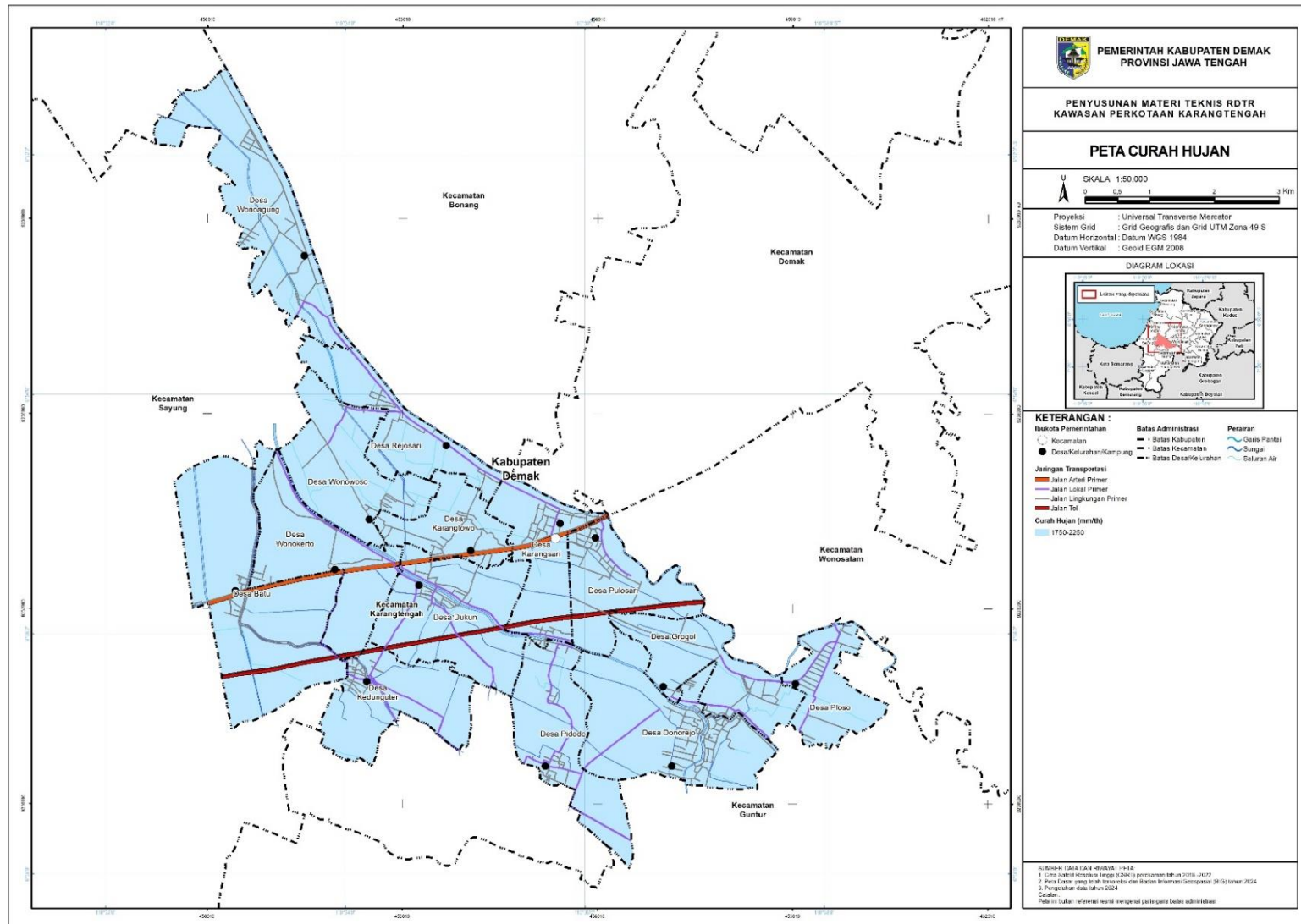
Gambar 3.1. Peta Delineasi Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.2. Peta Topografi Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.3. Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.4. Peta Curah Hujan Kawasan Perkotaan Karangtengah

3.1.4 GEOLOGI

Geologi merupakan kajian tentang kondisi geologi suatu wilayah yang mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan batuan, pergerakan lempeng tektonik, evolusi lanskap, serta proses-proses alami seperti erosi, vulkanisme, dan gempa bumi. Kondisi geologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa formasi alluvium yang tersebar di seluruh desa/kelurahan. Alluvium adalah jenis endapan yang terbentuk dari proses pengendapan material (pasir, lempung, kerikil, lumpur, dan bahan organik) yang dibawa oleh air, seperti sungai, danau, atau aliran banjir. Berikut ini adalah rincian luas dan sebaran formasi geologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.5.
Kondisi Geologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	GEOLOGI (Ha)	TOTAL
		FORMASI ALLUVIUM	
1	Pidodo	288,42	288,42
2	Donorejo	428,71	428,71
3	Grogol	255,76	255,76
4	Ploso	170,16	170,16
5	Pulosari	227,41	227,41
6	Karangsari	223,35	223,35
7	Karantowo	168,2	168,2
8	Dukun	365,06	365,06
9	Kedunguter	265,73	265,73
10	Batu	582,8	582,8
11	Wonokerto	310,4	310,4
12	Wonowoso	306,66	306,66
13	Rejosari	230,36	230,36
14	Wonoagung	397,91	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	4.220,93

Sumber: Data Tematik RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024

3.1.5 KONDISI TANAH

Jenis tanah pada Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa tanah aluvial. Desa/kelurahan dengan luas sebaran tanah aluvial paling besar adalah Desa Batu sebesar 582,81 Ha. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh air, seperti sungai, aliran banjir, atau pergerakan air lainnya. Karakteristik umum dari tanah aluvial adalah kesuburannya yang tinggi, karena seringkali mengandung banyak unsur hara yang dibawa oleh air. Tanah ini sangat baik untuk pertanian, namun sifat drainase dan kadar kelembaban tanah bisa bervariasi tergantung pada jenis material yang mengendap. Berikut ini adalah rincian luas dan sebaran jenis tanah di Kawasan Perkotaan Karangtengah

Tabel 3.6.
Jenis Tanah di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS TANAH (Ha)	TOTAL
		ALUVIAL	
1	Pidodo	288,42	288,42
2	Donorejo	428,71	428,71
3	Grogol	255,76	255,76
4	Ploso	170,16	170,16
5	Pulosari	227,41	227,41
6	Karangsari	223,35	223,35

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS TANAH (Ha)	TOTAL
		ALUVIAL	
7	Karangtowo	168,2	168,2
8	Dukun	365,06	365,06
9	Kedunguter	265,73	265,73
10	Batu	582,8	582,8
11	Wonokerto	310,4	310,4
12	Wonowoso	306,66	306,66
13	Rejosari	230,36	230,36
14	Wonoagung	397,91	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	4.220,93

Sumber: Data Tematik RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024

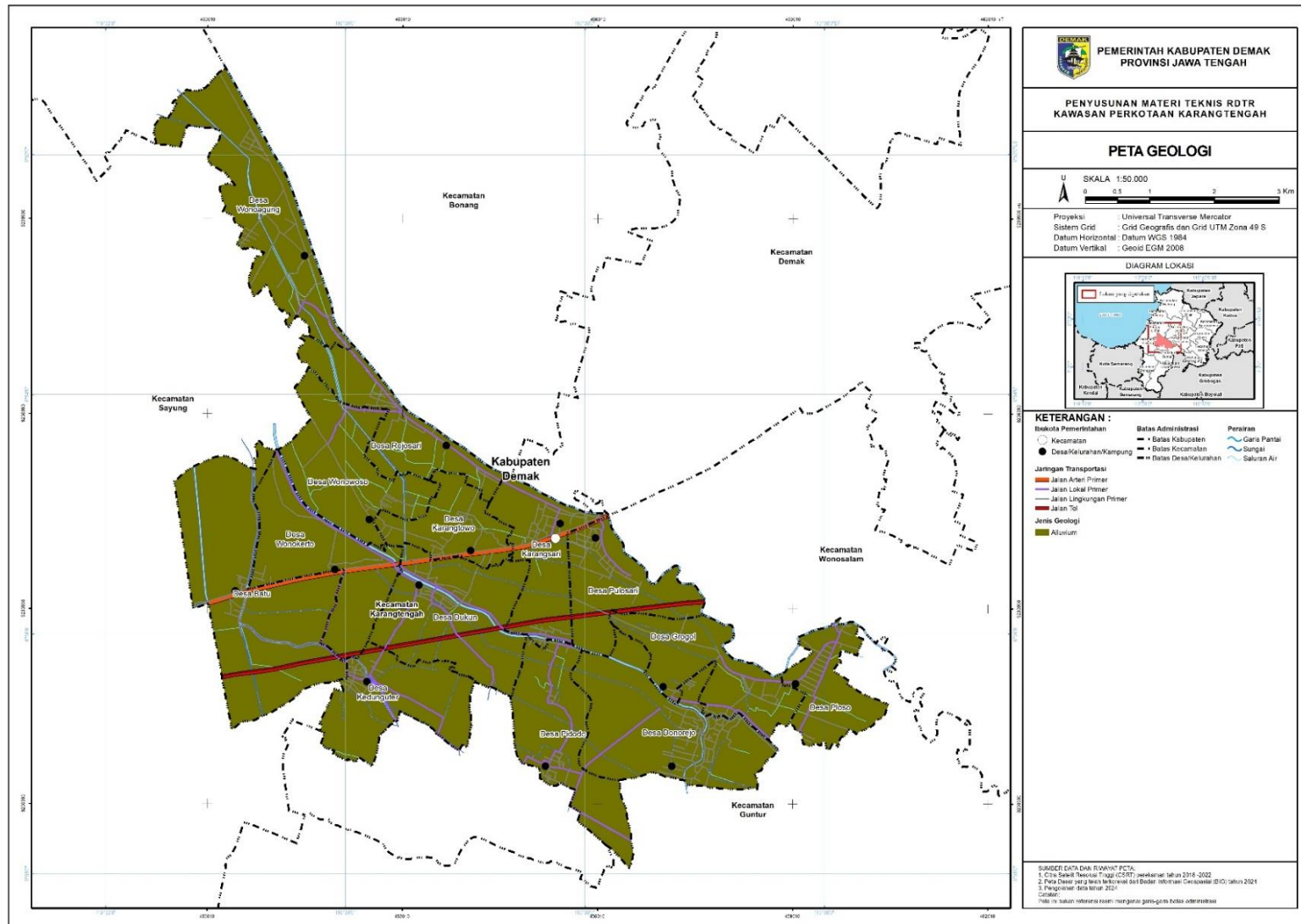
3.1.6 KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan Perkotaan Karangtengah termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan klasifikasi rendah, sedang dan tinggi dengan luasan masing-masing sebesar 16,64 Ha, 832,23 Ha, dan 3.370,06 Ha. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan Perkotaan Karangtengah didominasi oleh klasifikasi dengan total luasan sebesar 3.370,06 Ha. Desa/kelurahan dengan luas paling besar dalam kawasan rawan bencana banjir adalah Desa Batu sebesar 582,80 Ha. Sedangkan desa dengan luasan paling sedikit adalah Desa Ploso sebesar 170,16 Hektar. Berikut ini adalah rincian luas dan sebaran kawasan rawan bencana banjir di Kawasan Perkotaan Karangtengah

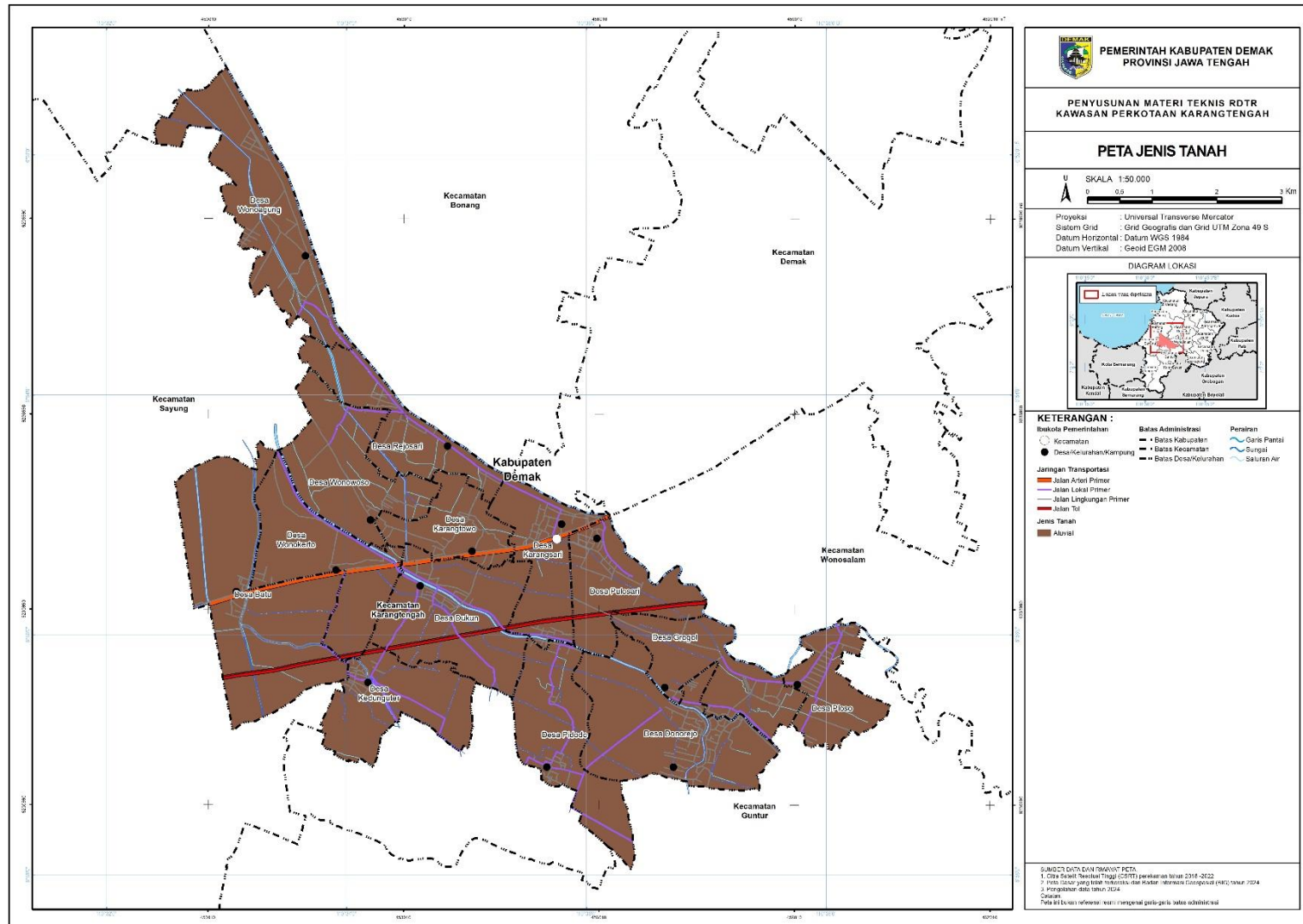
Tabel 3.7.
Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/ KELURAHAN	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR (HA)			TOTAL
		RAWAN BANJIR RENDAH	RAWAN BANJIR SEDANG	RAWAN BANJIR TINGGI	
1	Pidodo		42,27	246,15	288,42
2	Donorejo		100,03	328,69	428,71
3	Grogol		96,54	159,22	255,76
4	Ploso		67,21	102,94	170,16
5	Pulosari		86,81	140,6	227,41
6	Karangsari		74,33	149,02	223,35
7	Karangtowo		68,99	99,21	168,2
8	Dukun		67,67	297,39	365,06
9	Kedunguter		18,6	247,13	265,73
10	Batu	6,64	78,16	498	582,8
11	Wonokerto	4,42	33,27	272,71	310,4
12	Wonowoso	5,58	23,67	277,41	306,66
13	Rejosari		40,55	189,8	230,36
14	Wonoagung		36,14	361,77	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		16,64	834,23	3.370,06	4.220,93

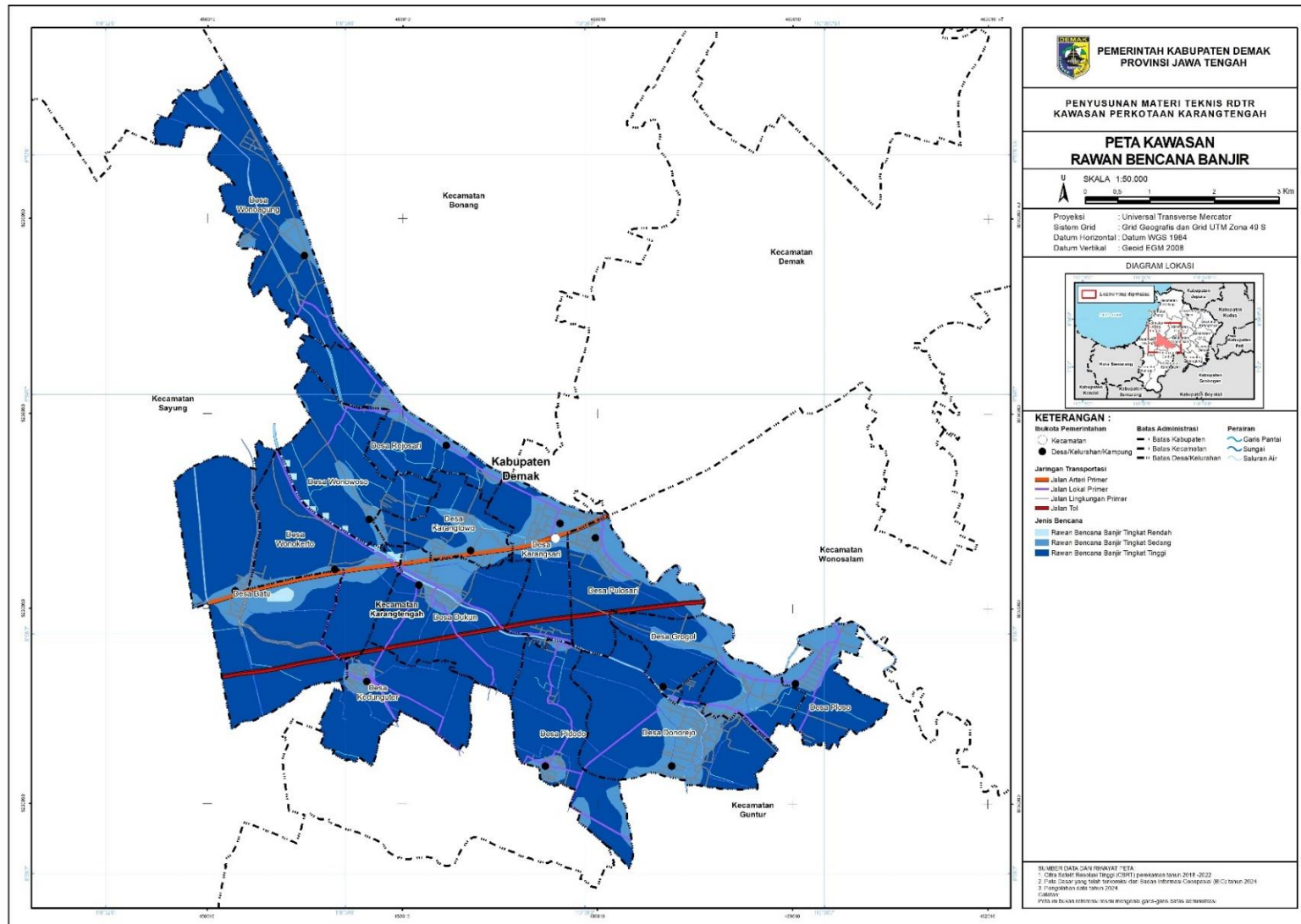
Sumber: Inarisk BNPB, diolah 2024



Gambar 3.5. Peta Geologi Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.6. Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.7. Peta Rawan Bencana Kawasan Perkotaan Karangtengah

3.1.7 KAWASAN HIDROGEOLOGI DAN DAS

Kondisi hidrogeologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa akuifer produktif dengan penyebaran luas yang tersebar di seluruh desa/kelurahan. Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas merujuk pada lapisan batuan atau sedimen yang mengandung air yang dapat dimanfaatkan secara signifikan untuk kebutuhan air tanah, yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyimpan dan mengalirkan air, serta tersebar dalam area yang luas. Berikut ini adalah rincian luas dan sebaran hidrogeologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah

Tabel 3.8.
Kondisi Hidrogeologi di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	HIDROGEOLOGI (Ha)	TOTAL
		AKUIFER PRODUKTIF DENGAN PENYEBARAN LUAS	
1	Pidodo	288,42	288,42
2	Donorejo	428,71	428,71
3	Grogol	255,76	255,76
4	Ploso	170,16	170,16
5	Pulosari	227,41	227,41
6	Karangsari	223,35	223,35
7	Karantowo	168,2	168,2
8	Dukun	365,06	365,06
9	Kedunguter	265,73	265,73
10	Batu	582,8	582,8
11	Wonokerto	310,4	310,4
12	Wonowoso	306,66	306,66
13	Rejosari	230,36	230,36
14	Wonoagung	397,91	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		4.220,93	4.220,93

Sumber: RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024

Wilayah di Kawasan Perkotaan Karangtengah termasuk dalam daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang-Demak. Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan air tanah.

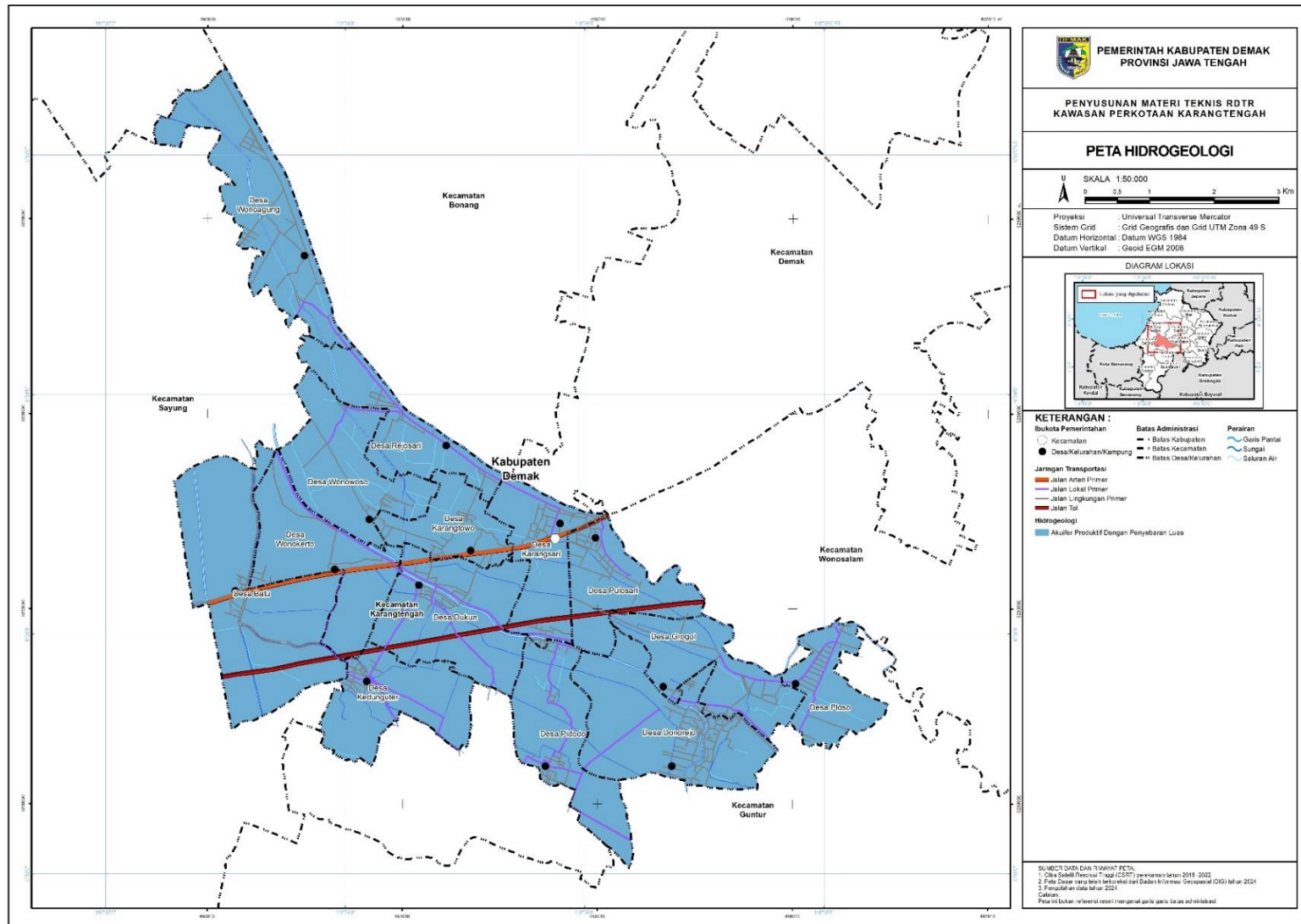
Kawasan Perkotaan Karangtengah juga dilewati oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diantaranya adalah DAS Dolok, DAS Jragung, DAS Satu, dan DAS Tuntang. Adapun dominasi DAS dengan luasan paling besar yang melewati Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah DAS Jragung dengan luasan mencapai 1.674,88 Ha. Berikut ini adalah rincian dari luas dan sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.9.
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	DESA/KELURAHAN	LUASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (Ha)				TOTAL
		DAS DOLOK	DAS JRAGUNG	DAS SATU	DAS TUNTANG	
1	Pidodo		283,78	4,64		288,42
2	Donorejo		416,97		11,75	428,71
3	Grogol		69,64		186,11	255,76
4	Ploso		21,5		148,66	170,16
5	Pulosari		17,56		209,85	227,41
6	Karangsari		35,78		187,57	223,35
7	Karantowo		32,96		135,24	168,2
8	Dukun		287,49	23,14	54,43	365,06
9	Kedunguter		61,07	204,66		265,73

NO	DESA/KELURAHAN	LUASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (Ha)				TOTAL
		DAS DOLOK	DAS JRAGUNG	DAS SATU	DAS TUNTANG	
10	Batu	39,54	6,72	536,55		582,8
11	Wonokerto		159,3	151,1		310,4
12	Wonowoso		197,96		108,7	306,66
13	Rejosari		0,03		230,32	230,36
14	Wonoagung		84,12		313,79	397,91
Kawasan Perkotaan Karangtengah		39,54	1.674,88	920,09	1.586,43	4.220,93

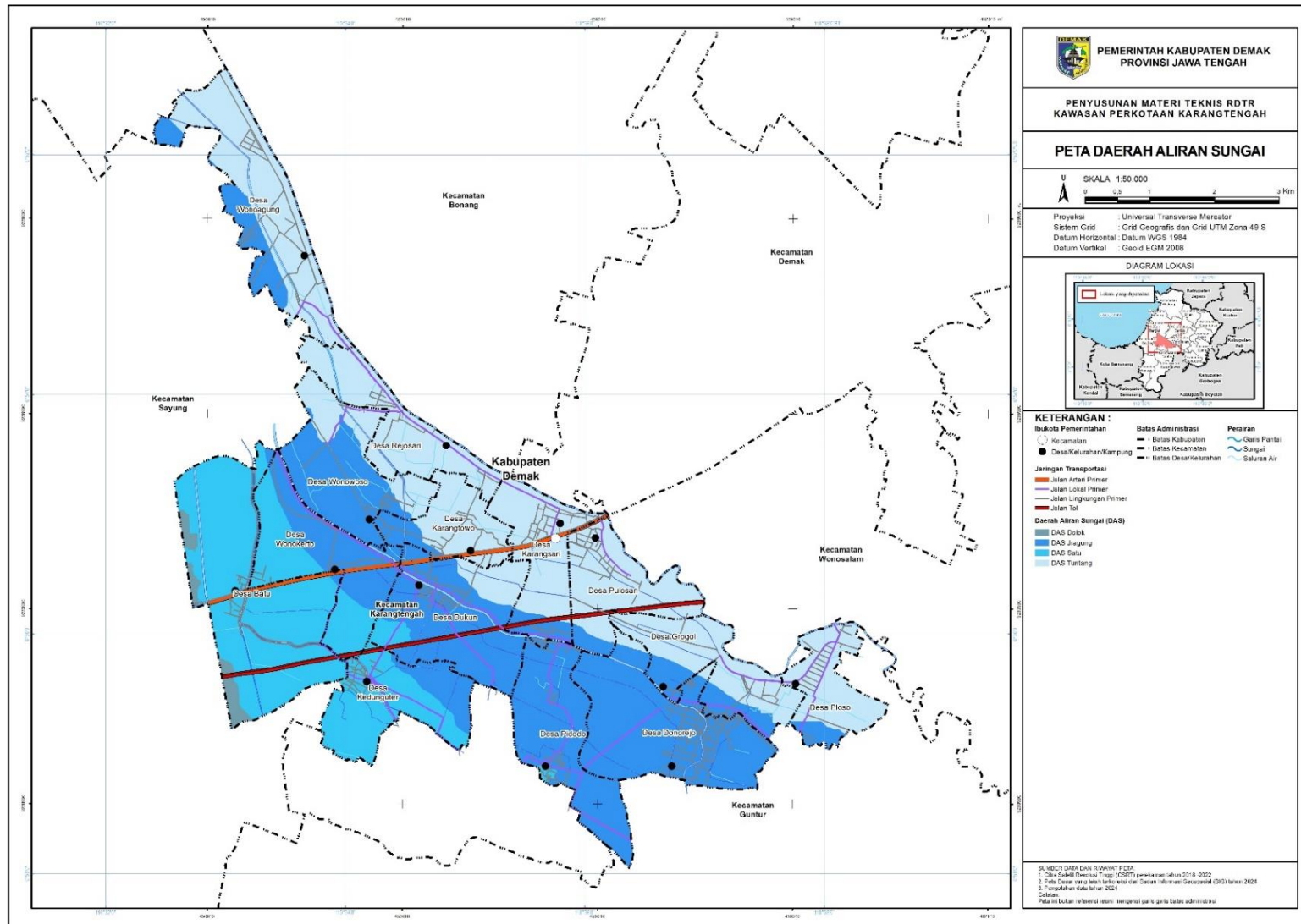
Sumber: RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024



Gambar 3.8. Peta Hidrogeologi Kawasan Perkotaan Karang Tengah



Gambar 3.9. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.10. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kawasan Perkotaan Karang Tengah

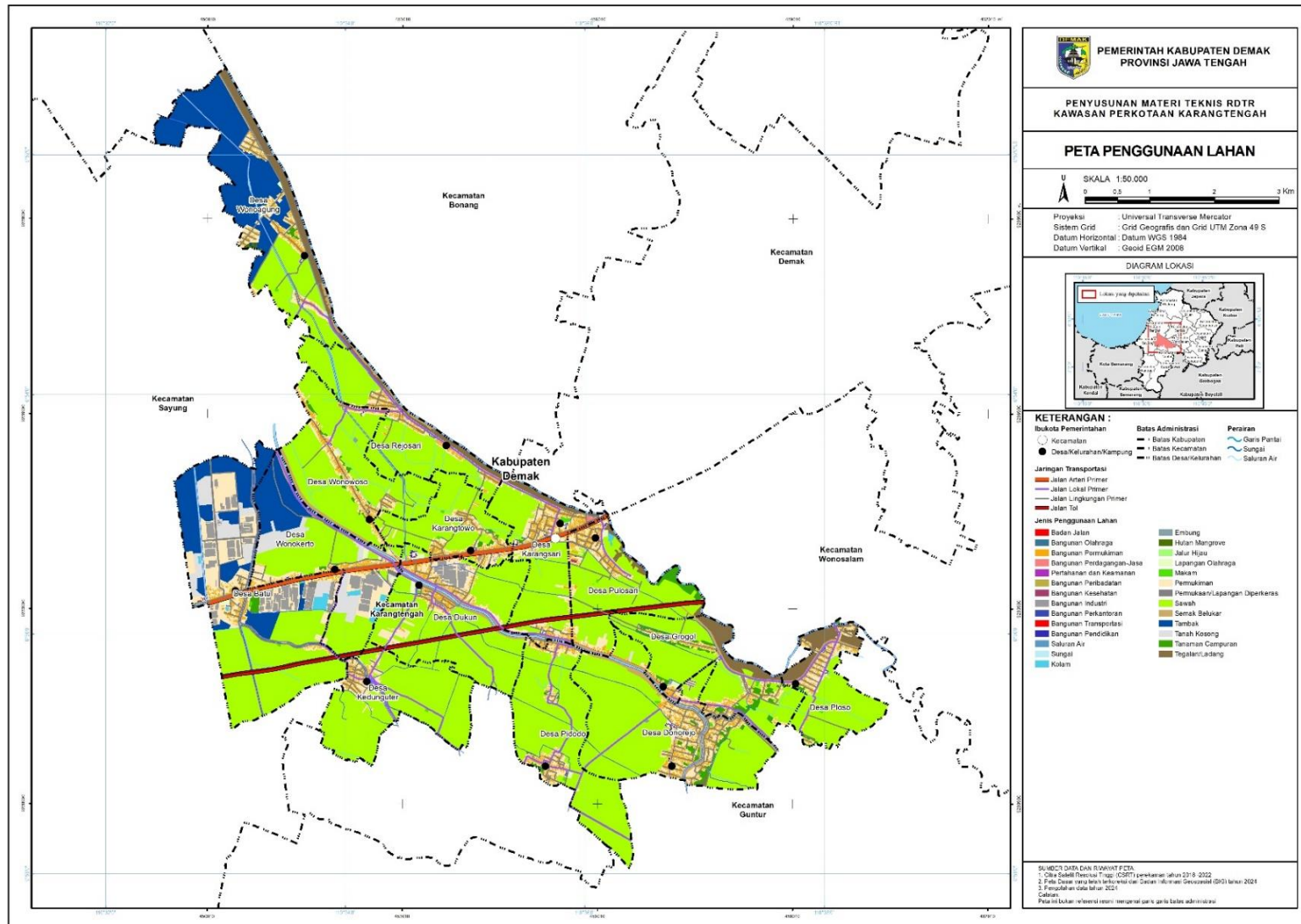
3.1.8 PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING

Karakteristik penggunaan lahan pada dasarnya memegang peran penting dalam mengenali aktivitas-aktivitas, kondisi sebaran jenis penggunaan serta kegiatan pemanfaatan lahan yang terjadi di dalam suatu wilayah perencanaan. Kondisi umum tutupan lahan di Kecamatan Karangtengah terdiri dari beberapa jenis penggunaan lahan yang tersebar di masing-masing desa/kelurahan. Adapun jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah Sawah sebesar 2.466,01 Ha, Pekarangan sebesar 589,15 Ha, dan Tambak sebesar 364,84 Ha. Berikut ini adalah rincian luas dari penggunaan lahan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.10.
Luas Tutupan Lahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
1	Badan Jalan	55,48
2	Embung	1,02
3	Hutan Mangrove	1,26
4	Industri	164,38
5	Jalur Hijau	41,67
6	Kesehatan	1,92
7	Kolam	12,28
8	Lapangan Olahraga	12,89
9	Makam	6,68
10	Olahraga	0,15
11	Pekarangan	589,15
12	Pendidikan	12,66
13	Peribadatan	2,33
14	Perkantoran	2,49
15	Permukaan/Lapangan Diperkeras	16,46
16	Pertahanan dan Keamanan	0,14
17	Saluran Air	47,31
18	Sawah	2.466,01
19	Semak Belukar	108,08
20	Sungai	54,02
21	Tambak	364,84
22	Tanah Kosong	76,70
23	Tanaman Campuran	54,22
24	Tegalan/Ladang	128,81
LUAS TOTAL		4.220,93

Sumber: Data Tematik RTRW Kabupaten Demak 2011-2031, diolah 2024



Gambar 3.11. Peta Tutupan Lahan Kawasan Perkotaan Karang Tengah

3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA WILAYAH PERENCANAAN

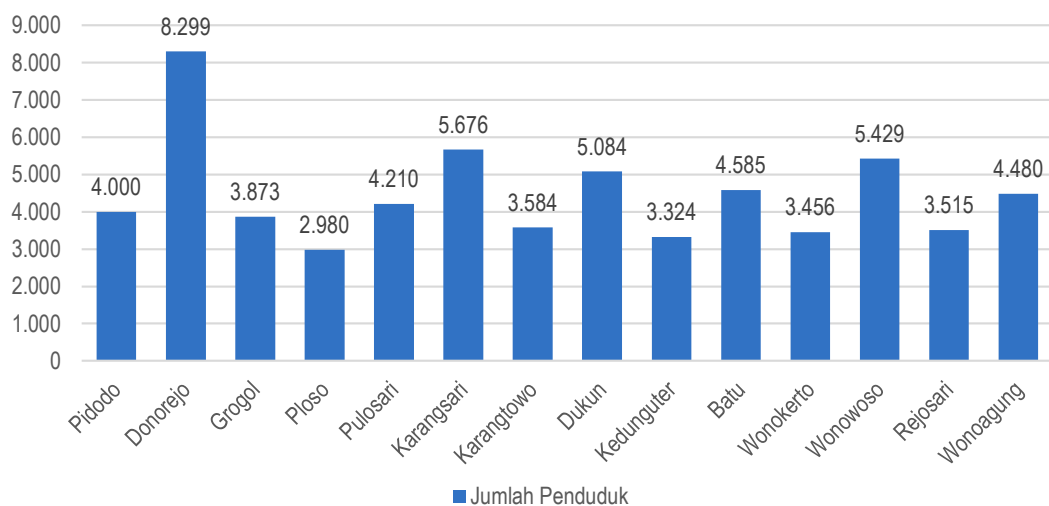
3.2.1 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

Jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 sebanyak 62.495 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.412 jiwa/km². Pada tahun 2023, desa/kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Desa Donorejo sebesar 8.299 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Tambakbulusan sebesar 2.603 jiwa.

Tabel 3.11.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Pidodo	4.000	6,40
2	Donorejo	8.299	13,28
3	Grogol	3.873	6,20
4	Ploso	2.980	4,77
5	Pulosari	4.210	6,74
6	Karangsari	5.676	9,08
7	Karangtowo	3.584	5,73
8	Dukun	5.084	8,14
9	Kedunguter	3.324	5,32
10	Batu	4.585	7,34
11	Wonokerto	3.456	5,53
12	Wonowoso	5.429	8,69
13	Rejosari	3.515	5,62
14	Wonoagung	4.480	7,17
Kawasan Perkotaan Karangtengah		62.495	100,00

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



Gambar 3.12. Grafik Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023

3.2.2 KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah yang ditempati, sehingga kepadatan penduduk dapat dikatakan padat apabila jumlah penduduk pada suatu daerah tertentu semakin banyak sementara lahannya tetap. Tujuannya adalah untuk memahami distribusi populasi, mengidentifikasi pola persebaran, dan mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan, infrastruktur, dan kebutuhan layanan publik.

A. KEPADATAN PENDUDUK BRUTO

Kepadatan bruto adalah jumlah penduduk di dalam suatu daerah dibagi luas daerah berdasarkan batasan administrasi yang ada, tanpa pertimbangan peruntukan lahan pada daerah tersebut. Berdasarkan acuan dari SNI 03-1733-2004 mengenai tata cara perencanaan Kawasan kota dimana kepadatan penduduk dikategorikan menjadi :

- a. Kepadatan Rendah : < 150 Jiwa/Ha
- b. Kepadatan Sedang : 151-200 Jiwa/Ha
- c. Kepadatan Tinggi : 201-400 Jiwa/Ha
- d. Kepadatan Sangat Padat : > 400 Jiwa/Ha

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kepadatan bruto tertinggi di Kawasan Perkotaan Karangtengah berada pada Desa Karangsari sebesar 25 Jiwa/Ha dan kepadatan bruto terendah berada pada Desa Batu sebesar 8 jiwa/Ha. Berikut ini adalah tabel rincian perhitungan kepadatan bruto Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023.

Tabel 3.12.
Kepadatan Penduduk Bruto Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH (Ha)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)
1	Pidodo	4.000	288,42	14
2	Donorejo	8.299	428,71	19
3	Grogol	3.873	255,76	15
4	Ploso	2.980	170,16	18
5	Pulosari	4.210	227,41	19
6	Karangsari	5.676	223,35	25
7	Karantowo	3.584	168,20	21
8	Dukun	5.084	365,06	14
9	Kedunguter	3.324	265,73	13
10	Batu	4.585	582,81	8
11	Wonokerto	3.456	310,40	11
12	Wonowoso	5.429	306,66	18
13	Rejosari	3.515	230,36	15
14	Wonoagung	4.480	397,91	11
Kawasan Perkotaan Karangtengah		62.495	4.217,78	15

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, diolah 2024

B. KEPADATAN PENDUDUK NETTO

Kepadatan penduduk netto yaitu hasil perhitungan dari jumlah penduduk tahun tersebut dalam satuan jiwa dibagi dengan luas lahan terbangun dalam satuan hektar. Perhitungan kepadatan netto ini berfungsi sebagai alat ukur terhadap luas lahan terbangun yang ada dengan jumlah penduduk di suatu kawasan. Berikut rumus perhitungan kepadatan netto:

$$\text{Kepadatan Netto} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Lahan Terbangun (Ha)}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kepadatan netto di Kawasan Perkotaan Karagtengah dapat dikategorikan menjadi

- a. Kepadatan Rendah : 86 – 92 Jiwa/Ha
- b. Kepadatan Sedang : 92 – 99 Jiwa/Ha
- c. Kepadatan Tinggi : 99 – 112 Jiwa/Ha
- d. Kepadatan Sangat Padat : 112 – 126 Jiwa/Ha

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kepadatan netto di wilayah perencanaan sebesar 100 jiwa/Ha. Desa dengan kepadatan tertinggi di Desa Kedunguter sebesar 127 jiwa/Ha dan Desa dengan kepadatan terendah di Desa Karangsari sebesar 90 jiwa/Ha. Berikut ini adalah tabel rincian perhitungan kepadatan netto bruto Kawasan Perkotaan Karagtengah pada tahun 2023.

Tabel 3.13.
Perhitungan Kepadatan Netto Kawasan Perkotaan Karagtengah Tahun 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	KEPADATAN NETTO (Jiwa/Ha)
1	Pidodo	4.000	35,6	112
2	Donorejo	8.299	78,7	105
3	Grogol	3.873	39,1	99
4	Ploso	2.980	32,5	92
5	Pulosari	4.210	44,8	94
6	Karangsari	5.676	62,9	90
7	Karagtowo	3.584	37,4	96
8	Dukun	5.084	53,3	95
9	Kedunguter	3.324	26,2	127
10	Batu	4.585	53,4	86
11	Wonokerto	3.456	31,2	111
12	Wonowoso	5.429	45,1	120
13	Rejosari	3.515	33,5	105
14	Wonoagung	4.480	48,7	92
Kawasan Perkotaan Karagtengah		62.495	622,5	100

Sumber: Kecamatan Karagtengah dalam Angka, diolah 2024

3.2.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Karagtengah tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Karagtengah mencapai 62.495 jiwa dengan 31.633 jiwa (50,67%) penduduk laki-laki dan 30.862 jiwa (49,38%) penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,11% per tahun 2022-2023. Berikut ini adalah tabel distribusi penduduk di Kawasan Perkotaan Karagtengah pada tahun 2019-2023.

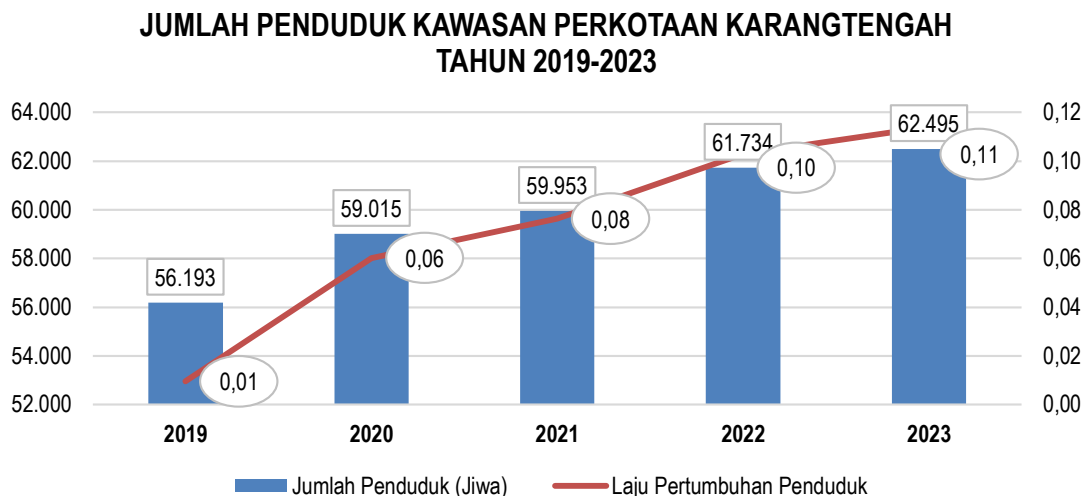
Tabel 3.14.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karagtengah Tahun 2019-2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pidodo	2.798	3.658	3.815	3.956	4.000
2	Donorejo	7.117	7.767	7.851	8.184	8.299
3	Grogol	3.343	3.619	3.658	3.760	3.873
4	Ploso	2.758	2.757	2.813	2.948	2.980
5	Pulosari	4.149	4.054	4.122	4.183	4.210

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Karangsari	5.310	5.539	5.675	5.723	5.676
7	Karangtowo	3.218	3.358	3.360	3.516	3.584
8	Dukun	4.763	4.848	4.907	5.067	5.084
9	Kedunguter	2.608	3.117	3.134	3.265	3.324
10	Batu	4.149	4.355	4.432	4.544	4.585
11	Wonokerto	3.285	3.278	3.341	3.428	3.456
12	Wonowoso	6.132	5.099	5.188	5.325	5.429
13	Rejosari	2.973	3.314	3.376	3.461	3.515
14	Wonoagung	3.590	4.252	4.281	4.374	4.480
Kawasan Perkotaan Karangtengah		55.662	56.193	59.015	61.734	62.495

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Pada tahun 2019 sampai 2023, Kawasan Perkotaan Karangtengah mengalami peningkatan jumlah penduduk terus menerus. Peningkatan jumlah penduduk paling tinggi mencapai 2.822 jiwa, yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 56.193 jiwa menjadi 59.015 jiwa pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.



Gambar 3.13. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 – 2023

3.2.4 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA DAN DEPENDENCY RATIO

Usia merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan tahapan perkembangan hidupnya. Usia dapat dibedakan menjadi rentang usia belum produktif (<14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Karangtengah pada tahun 2023 memiliki komposisi usia penduduk sebagai berikut:

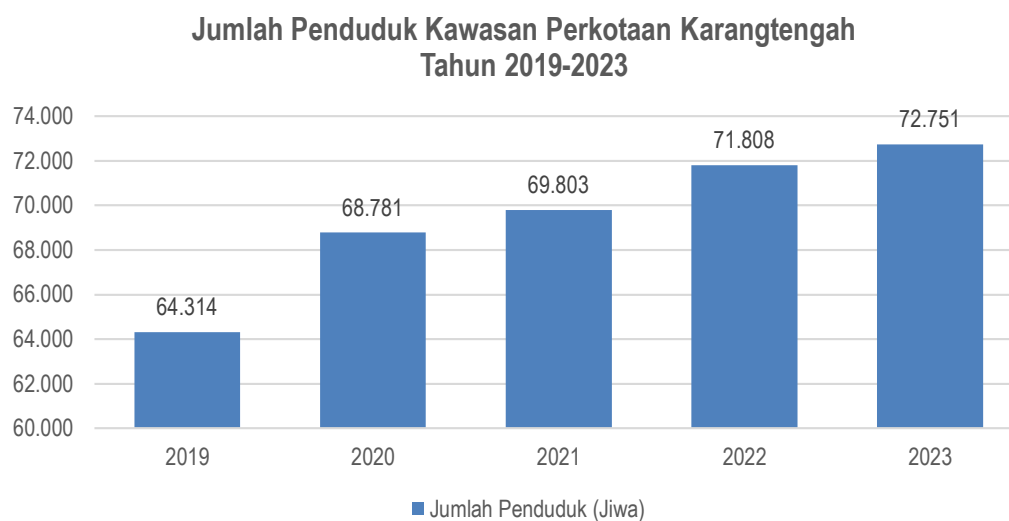
- Usia belum produktif (<14 Tahun) : 19.060 jiwa (26,20%)
- Usia produktif (15-64 tahun) : 49.851 jiwa (68,52%)
- Usia tidak produktif (>65 Tahun) : 3.840 jiwa (5,28%)

Komposisi penduduk menurut usia dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, yaitu grafik batang horizontal yang menunjukkan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok usia. Berikut adalah tabel rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kawasan Perkotaan Karangtengah

Tabel 3.15.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	5.126	5.558	6.143	6.312	6.223
5-9	5.444	5.903	6.483	6.625	6.629
10-14	5.642	6.118	5.932	6.229	6.208
15-19	6.021	6.517	4.551	4.823	5.512
20-24	6.066	6.566	5.613	5.661	5.803
25-29	5.040	5.455	6.014	5.917	5.669
30-34	4.441	4.807	5.893	6.106	6.284
35-39	4.501	4.872	5.699	5.568	5.721
40-44	4.535	4.909	5.099	5.484	5.560
45-49	4.169	4.512	4.532	4.473	4.694
50-54	3.768	4.078	3.968	4.146	4.166
55-59	3.065	3.317	3.431	3.571	3.436
60-64	2.467	2.670	2.797	2.926	3.006
65+	4.029	3.499	3.648	3.967	3.840
Total		68.781	69.803	71.808	72.751

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



Gambar 3.14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2019-2023

Dependency ratio (rasio ketergantungan) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak bekerja (tergantungan) terhadap penduduk yang bekerja dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk produktif (usia kerja) untuk mendukung penduduk non-produktif, yaitu anak-anak (usia 0-14 tahun) dan lansia (usia 65 tahun ke atas). Berdasarkan tabel terkait dengan data usia produktif dan usia non produktif maka diketahui *dependency ratio* di Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah 45,94. Artinya, dalam 100 orang usia produktif yang bekerja memiliki tanggungan sebanyak 45,94 orang usia non produktif angka tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk menunjukkan angka yang cukup rendah dimana angka tersebut tidak melebihi dari 50%.

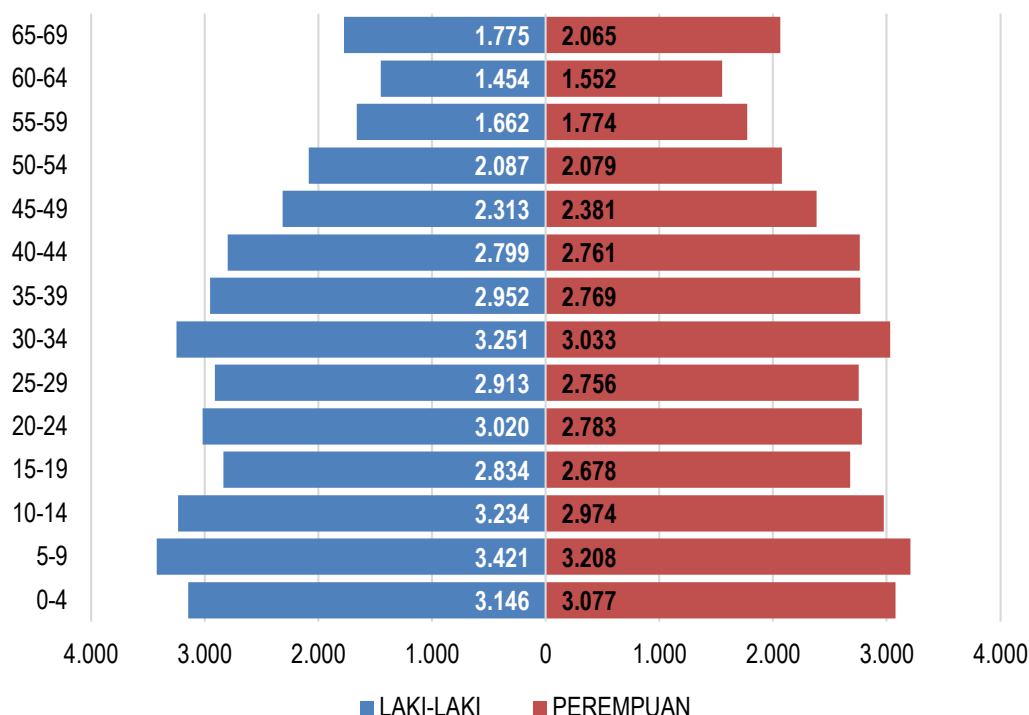
Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total. *Dependency ratio* ini salah satu indikator demografi untuk melihat angka ketergantungan karena semakin tingginya

persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dilihat sex ratio produktif yaitu 103 dengan arti dalam 100 perempuan usia produktif terdapat 103 laki-laki usia produktif. Kesimpulannya adalah usia produktif perempuan lebih tinggi dibanding usia produktif laki laki.

Tabel 3.16.
Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		JUMLAH
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	
0-4	3.146	3.077	6.223
5-9	3.421	3.208	6.629
10-14	3.234	2.974	6.208
15-19	2.834	2.678	5.512
20-24	3.020	2.783	5.803
25-29	2.913	2.756	5.669
30-34	3.251	3.033	6.284
35-39	2.952	2.769	5.721
40-44	2.799	2.761	5.560
45-49	2.313	2.381	4.694
50-54	2.087	2.079	4.166
55-59	1.662	1.774	3.436
60-64	1.454	1.552	3.006
65+	1.775	2.065	3.840
Jumlah Penduduk	36.861	35.890	72.751
Belum Produktif	9.801	9259	19.060
Produktif	25.285	24.566	49.851
Tidak Produktif	1.775	2.065	3.840
Dependency Ratio	-	-	45,94
Sex Ratio Produktif	-	-	102,93

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



Gambar 3.15. Piramida Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2023

3.2.5 PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Komposisi penduduk di Kawasan Perkotaan Karangtengah relatif seimbang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yaitu perbandingan penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kawasan Perkotaan Karangtengah, angka *sex ratio* pada tahun 2023 mencapai 103 jiwa. Hal ini berarti terdapat 103 jiwa laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.17.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pidodo	2.006	1.994	4.000
2	Donorejo	4.231	4.068	8.299
3	Grogol	1.952	1.921	3.873
4	Ploso	1.534	1.446	2.980
5	Pulosari	2.105	2.105	4.210
6	Karangsari	2.873	2.803	5.676
7	Karangtwo	1.786	1.798	3.584
8	Dukun	2.592	2.492	5.084
9	Kedunguter	1.677	1.647	3.324
10	Batu	2.296	2.289	4.585
11	Wonokerto	1.774	1.682	3.456
12	Wonowoso	2.776	2.653	5.429
13	Rejosari	1.797	1.718	3.515
14	Wonoagung	2.234	2.246	4.480

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
	Kawasan Perkotaan Karangtengah	36.861	35.890	62.495

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

3.2.6 PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

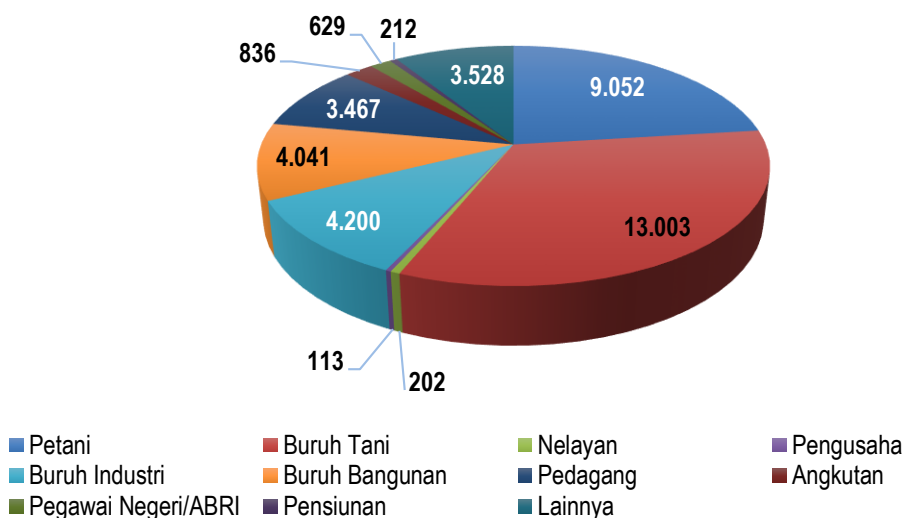
Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan mengacu pada distribusi tenaga kerja dalam berbagai sektor pekerjaan atau lapangan usaha di suatu wilayah. Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan pada tahun 2019 didapati jumlah penduduk bekerja paling banyak yakni buruh tani, petani, dan buruh industri. Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 3.18.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Mata Pencaharian

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	
	2018	2019
Petani	9.052	9.052
Buruh Tani	13.003	13.003
Nelayan	202	202
Pengusaha	113	113
Buruh Industri	4.200	4.200
Buruh Bangunan	4.041	4.041
Pedagang	3.467	3.467
Angkutan	836	836
Pegawai Negeri/ABRI	629	629
Pensiunan	212	212
Lainnya	3.528	3.528
Jumlah	39.283	39.283

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019



Gambar 3.16. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

3.2.7 PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan penduduk di Kawasan Perkotaan Karangtengah masih tergolong cukup rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data bahwasannya dominasi penduduk dengan jenjang pendidikan SD cukup tinggi yakni sebesar 21.087 jiwa atau setara dengan 38% dari jumlah penduduk total pada tahun 2019. Sehingga tingkat pendidikan menjadi faktor pemengaruh yang penting untuk dipertimbangkan terkait dengan kasus kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 3.19.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	
	2018	2019
Tidak/Belum Sekolah	3.881	3.881
Belum Tamat SD	7.532	7.532
Tidak Tamat SD	5.769	5.769
SD	21.087	21.087
SLTP	6.128	6.128
SLTA	4.206	4.206
Akademi/PT	562	562

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2020

3.2.8 PENDUDUK MENURUT AGAMA

Agama merupakan salah satu faktor dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan sarana peribadatan guna kemaslahatan umat beragama. Setiap penduduk berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mayoritas penduduk di Kawasan Perkotaan Karangtengah menganut agama Islam mencapai 72.682 jiwa pada tahun 2023.

Tabel 3.20.
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Karangtengah Berdasarkan Agama Tahun 2019 – 2023

AGAMA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Islam	63.701	66.781	69.726	71.732	72.682
Kristen Katholik	41	62	20	18	17
Kristen Protestan	39	19	54	52	46
Hindu	0	0	0	0	0
Budha	0	0	0	3	3
Lainnya	0	4	3	3	3

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

3.2.9 KONDISI KEMISKINAN

Analisis kemiskinan menggunakan data penduduk miskin per desil adalah metode untuk mengevaluasi distribusi kemiskinan dalam suatu populasi dengan membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok, atau desil, berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi. Desil pertama, D1, adalah kelompok dengan pendapatan terendah, dan desil kesepuluh, D10, adalah kelompok dengan pendapatan tertinggi. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kemiskinan menyebar di masyarakat, membantu mengidentifikasi kelompok yang paling rentan dari kemiskinan, dan membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Analisis ini bertujuan untuk merancang program intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Tabel 3.21.
Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Karangtengah Tahun 2023

KECAMATAN	PENDUDUK MISKIN (JIWA)				JUMLAH
	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	
Kecamatan Karangtengah	8.352	7.729	7.462	8.059	31.602

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024

3.2.10 KONDISI SOSIAL BUDAYA

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Karangtengah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami transformasi dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani menjadi buruh industri. Akan tetapi masyarakat di Kecamatan Karangtengah adalah masyarakat yang menganut sistem masyarakat terbuka. Masyarakat ini cenderung menerima perubahan, menghargai keberagaman, dan cepat beradaptasi dengan pengaruh eksternal, baik dari budaya lain maupun perkembangan teknologi. Studi ini mencakup pola komunikasi, nilai-nilai yang berkembang, dan pengaruh modernisasi terhadap tradisi lokal. Sehingga, masyarakat Kecamatan Karangtengah tidak keberatan dengan adanya transformasi mata pencaharian penduduk tersebut.

Selain sosial kemasyarakatan, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak memiliki kondisi sosial budaya yang kaya dan beragam. Terkait dengan kondisi sosialnya, mayoritas penduduk di Kecamatan Karangtengah bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sosial budaya masyarakat juga berkaitan dengan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat. Dominasi agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Karangtengah adalah agama Islam. Sehingga hal tersebut juga berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang diadakan, seperti halnya pengajian rutin, perayaan hari besar Islam, serta tradisi ziarah ke makam yang juga didukung dengan keberadaan beberapa wisata religi yang ada di Kabupaten Demak.

Salah satu bentuk kearifan budaya lokal yang diadakan di Kecamatan Karangtengah adalah tradisi Apitan. Tradisi Apitan atau dikenal dengan istilah sedekah bumi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, tepatnya pada bulan Apit dalam penanggalan bulan Jawa atau bertepatan dengan bulan dzulqo'sudah dalam penanggalan hijriyah. Sedekah bumi dapat diartikan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah serta ikhtiar dan doa masyarakat agar senantiasa terhindar dari musibah serta diberikan hasil bumi yang melimpah pula. Tradisi Apitan ditandai dengan pagelaran wayang kulit yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama serta pagelaran ketoprak. Dalam pelaksanaan tradisi Apitan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat, dari tokoh masyarakat hingga anak-anak. Sehingga, kegiatan tersebut tentu memberikan pengaruh pada kondisi sosial budaya masyarakat, menciptakan solidaritas yang kuat antara warga serta menjaga nilai-nilai kebersamaan.



Gambar 3.17. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Karang Tengah

3.3. KONDISI EKONOMI WILAYAH PERENCANAAN

3.3.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk domestik regional bruto terbagi atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan Produk domestik bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi yakni atas dasar harga berlaku menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan untuk harga konstan didasarkan pada satu tahun dasar tertentu. PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

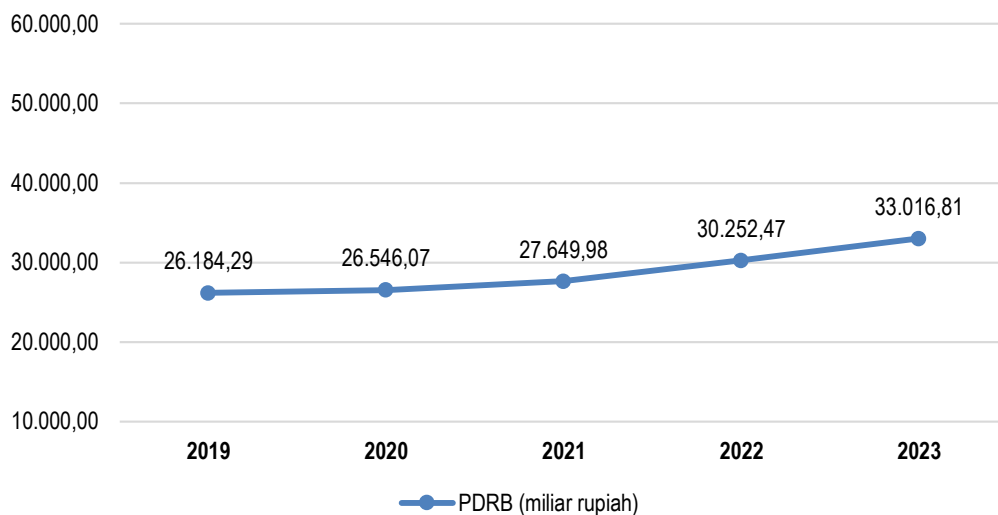
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak terdiri dari 17 sektor yang berkontribusi dalam perekonomian wilayahnya. Selama lima tahun dalam rentang 2019-2023, PDRB Kabupaten Demak mengalami fluktuasi. Tiga lapangan usaha yang memberikan distribusi terbesar pada nilai PDRB Kabupaten Demak diantaranya (1) Industri Pengolahan, (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta (3) Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Nilai PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga konstan pada tahun 2023 mencapai 20.839,75 miliar rupiah. Sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 33.016,81 miliar rupiah.

Tabel 3.22.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.698,07	3.790,24	3.708,47	3.689,42	3.634,92
B	Pertambangan dan Penggalian	77,53	62,70	64,56	58,41	66,43
C	Industri Pengolahan	55.487,47	5.335,09	5.583,26	5.964,93	6.265,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,00	19,47	21,63	23,09	24,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,66	14,40	14,94	15,01	15,75
F	Konstruksi	1.567,33	1.852,84	1.898,05	1.938,30	2.111,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.169,16	3.032,78	3.178,48	3.323,48	3.499,74
H	Transportasi dan Pergudangan	577,44	416,35	421,08	658,80	722,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	473,25	455,73	471,92	527,75	591,76
J	Informasi dan Komunikasi	536,25	637,87	710,41	752,88	830,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	431,99	437,21	445,70	448,00	471,61

KATEGORI	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
L	Real Estate	255,85	255,68	256,94	268,92	287,81
M, N	Jasa Perusahaan	49,89	47,03	49,96	53,09	56,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	599,77	595,76	592,44	607,99	640,93
P	Jasa Pendidikan	786,47	776,25	784,56	802,03	851,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,08	160,21	163,40	168,15	178,15
R, S, T, U	Jasa Lainnya	524,81	484,93	490,61	546,19	589,70
Produk Domestik Regional Bruto		18.417,01	18.374,56	18.856,42	19.846,43	20.839,75

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024



Gambar 3.18. PDRB Kabupaten Demak Tahun 2019-2023

3.3.2 POTENSI EKONOMI WILAYAH

A. SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Potensi dari sektor pertanian pada Kawasan Perkotaan Karangtengah didominasi oleh tanaman sayuran, biofarmaka, buah buahan, dan perkebunan. Berikut ini adalah rincian mengenai luas panen dan produksi sektor pertanian menurut jenis tanaman sayuran di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2019-2023.

Tabel 3.23.
Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ku) Tanaman Sayur di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023

JENIS TANAMAN	LUAS PANEN (Ha)					PRODUKSI (KU)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Merah	5	7	1	1	4	385	560	70	70	272
Cabai Besar	1	0	0	0	0	82	0	0	0	0
Cabai Rawit	0	0	0	1	0	0	0	0	25	0
Cabai Keriting	0	0	0	0	1	0	0	0	0	45

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanaman sayuran paling banyak di Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 adalah bawang merah dengan luas panen 4 ha dan produksinya mencapai 272 kuintal.

Berikut ini adalah tabel luas panen dan produksi jenis tanaman biofarmaka di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2019-2023.

Tabel 3.24.
Luas Panen (m2) dan Produksi (Kg) Tanaman Biofarmaka di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023

JENIS TANAMAN	LUAS PANEN (M ²)					PRODUKSI (KG)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Jahe	42	29	21	31	35	106	132	28	93	105
Laos/Lengkuas	6	14	0	0	0	10	5	0	0	0
Kencur	4	3	0	1	0	9	7	2	0	0
Kunyit	38	26	21	28	47	115	107	46	87	141
Mengkudu	314	301	65	107	152	2.603	2.456	169	311	465

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanaman biofarmaka paling banyak di Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 adalah mengkudu dengan luas panen 152 m2 dan produksinya mencapai 465 kg.

Berikut ini adalah tabel produksi jenis tanaman buah-buahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2019-2023.

Tabel 3.25.
Produksi (Ku) Buah-buahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023

JENIS TANAMAN	PRODUKSI (KU)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mangga	17.536	7.657	14.022	9.280	9.732
Pisang	6.262	8.113	4.614	5.837	7.202
Pepaya	643	709	556	526	624
Belimbing	4.284	5.112	5.197	4.538	4.198
Jambu Air	3.898	3.176	2.857	2.824	2.818

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanaman buah-buahan paling banyak di Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 adalah mangga dengan jumlah produksi mencapai 9.732 kuintal.

Berikut ini adalah tabel luas panen dan produksi jenis tanaman perkebunan di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2019-2023.

Tabel 3.26.
Luas Panen (m2) dan Produksi (Ton) Perkebunan di Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2019 - 2023

JENIS TANAMAN	LUAS PANEN (M ²)					PRODUKSI (TON)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa	34	36	30	26	20	120.275	119.675	119.075	118.500	93.917
Kapuk Randu	30	24	19	16	0	9	7	7	7	0
Kelapa Hibrida	5	4	3	2	2	16.470	16.470	9.380	9.500	18.181

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanaman perkebunan paling banyak di Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 adalah kelapa luas panen 20 m2 dan jumlah produksi mencapai 93.917 ton.

Selain sektor pertanian, Kawasan Perkotaan Karangtengah juga memiliki potensi pada sektor peternakan yang meliputi ternak dan unggas. Berikut ini adalah tabel jumlah populasi ternak dan unggas di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2021-2023.

Tabel 3.27.
Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kawasan Perkotaan Karangtengah
Tahun 2021 - 2023

JENIS TERNAK	POPULASI (EKOR)		
	2021	2022	2023
Sapi	73	83	51
Kerbau	36	39	25
Kuda	29	29	26
Kambing	873	877	769
Domba	3.425	3.407	3.016
Kelinci	33	30	25

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Tabel 3.28.
Jumlah Populasi Unggas (Ekor) di Kawasan Perkotaan Karangtengah
Tahun 2021 – 2023

JENIS UNGGAS	POPULASI (EKOR)		
	2021	2022	2023
Ayam Boiler	1.845.200	2.903.000	2.962.000
Ayam Kampung	18.965	18.130	6.227
Itik	33	2.650	82.057
Angsa	8	0	152
Puyuh	12.000	12.000	10.000

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah komoditi ternak yang paling banyak pada Kawasan Perkotaan Karangtengah pada tahun 2023 yaitu domba mencapai 3.016 ekor. Sedangkan pada komoditi unggas paling banyak adalah kemudian ayam boiler sebanyak 2.962.000 ekor.

B. INDUSTRI

Sebaran industri di Kawasan Perkotaan Karangtengah didominasi oleh sektor kecil dan menengah, terutama industri pengolahan makanan, kerajinan lokal, dan tekstil. Lokasi industri cenderung terpusat di dekat jalur transportasi utama dan area permukiman, memanfaatkan aksesibilitas untuk distribusi produk. Sebaran ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya lokal dan daya dukung wilayah, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian kecamatan. Berdasarkan data sebaran industri berikut diketahui bahwa di Kawasan Perkotaan Karangtengah terdapat 12 Perusahaan Industri dari berbagai bidang usaha skala dari Nasional hingga Multinasional.

Tabel 3.29.
Sebaran Industri Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	SKALA
1	Nusantara Building Industries	Asbes	Nasional
2	Karya Cipta Unggul Nusantara	Furniture	Nasional
3	Reckitt Benckiser Indonesia	Obat nyamuk bakar tiga roda	Multinasional
4	Glory Industrial Semarang	Pakaian Jadi	Nasional
5	Bahana Buana Box	Kemasan Karton	Nasional
6	Purinusa Ekapersada	Kemasan Karton	Multinasional
7	Artha Kayu Indonesia	Flooring Kayu Lapis	Multinasional
8	Foresindo Sumber Alam Jaya	Penggergajian Kayu	Nasional
9	Polirubber Indo Perkasa	Vulkanisir Ban	Nasional
10	Triconville Indonesia	Furniture/Mebel dari Baja	Multinasional
11	PT Liputra Istana Teknologi	27510 (industri peralatan listrik rumah tangga)	Multinasional

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	SKALA
12	PT Struktur Baja Ringan Indonesia	24101 (Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making))	Multinasional

Sumber: Satu Data Demak (Data Perusahaan Tahun 2023)

3.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH PERENCANA

3.4.1 KONDISI SARANA WILAYAH

A. SARANA PENDIDIKAN

Kebutuhan pendidikan di Kawasan Perkotaan Karangtengah terlayani dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup lengkap mulai dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Berdasarkan kajian terkait ketersediaan sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Karangtengah, diketahui bahwa terdapat 20 unit TK/RA, 25 SD/ sederajat, 6 SMP/ sederajat, dan 7 SMA/ sederajat. Berikut adalah sebaran dan jumlah ketersediaan sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

Tabel 3.30.

Jumlah Ketersediaan Sarana Pendidikan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	SARANA PENDIDIKAN (UNIT)							
		TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1	Pidodo	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Donorejo	1	2	1	1	0	0	0	0
3	Grogol	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Ploso	0	1	1	0	1	1	0	0
5	Pulosari	1	1	0	0	1	0	0	0
6	Karangsari	4	4	1	0	0	1	1	0
7	Karangtowo	1	1	0	1	0	0	0	0
8	Dukun	1	1	0	0	0	1	0	1
9	Kedunguter	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Batu	2	2	0	1	0	0	0	1
11	Wonokerto	1	2	0	0	0	0	0	0
12	Wonowoso	2	2	0	0	1	0	0	1
13	Rejosari	1	1	0	0	0	0	0	0
14	Wonoagung	2	1	0	0	0	0	0	0
Kawasan Perkotaan Karangtengah		20	22	3	3	3	3	1	3

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



(a)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Karangtowo



(b)

Sekolah Dasar Negeri di Desa Kedunguter



(c)

SMPN 1 Karangtengah di Desa Karangtowo



(d)

SMAN 1 Karangtengah di Desa Dukun

Gambar 3.19. Kondisi Sarana Pendidikan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

B. SARANA PERIBADATAN

Berdasarkan kajian terkait ketersediaan sarana peribadatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah, diketahui bahwa terdapat 230 Mushola, 41 Masjid, dan 1 Gereja. Berikut adalah sebaran dan jumlah ketersediaan sarana peribadatan Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.31.

Jumlah Ketersediaan Sarana Peribadatan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	SARANA PERIBADATAN (UNIT)		
		MUSHOLA	MASJID	GEREJA
1	Pidodo	16	3	0
2	Donorejo	40	5	0
3	Grogol	18	4	0
4	Ploso	18	2	0
5	Pulosari	10	2	1
6	Karangsari	18	2	0
7	Karangtowo	14	2	0
8	Dukun	15	2	0
9	Kedunguter	6	2	0
10	Batu	16	4	0
11	Wonokerto	14	2	0

NO	DESA/KELURAHAN	SARANA PERIBADATAN (UNIT)		
		MUSHOLA	MASJID	GEREJA
12	Wonowoso	15	3	0
13	Rejosari	13	3	0
14	Wonoagung	17	5	0
Kawasan Perkotaan Karangtengah		230	41	1

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



(a)

Mushola di Desa Grogol



(b)

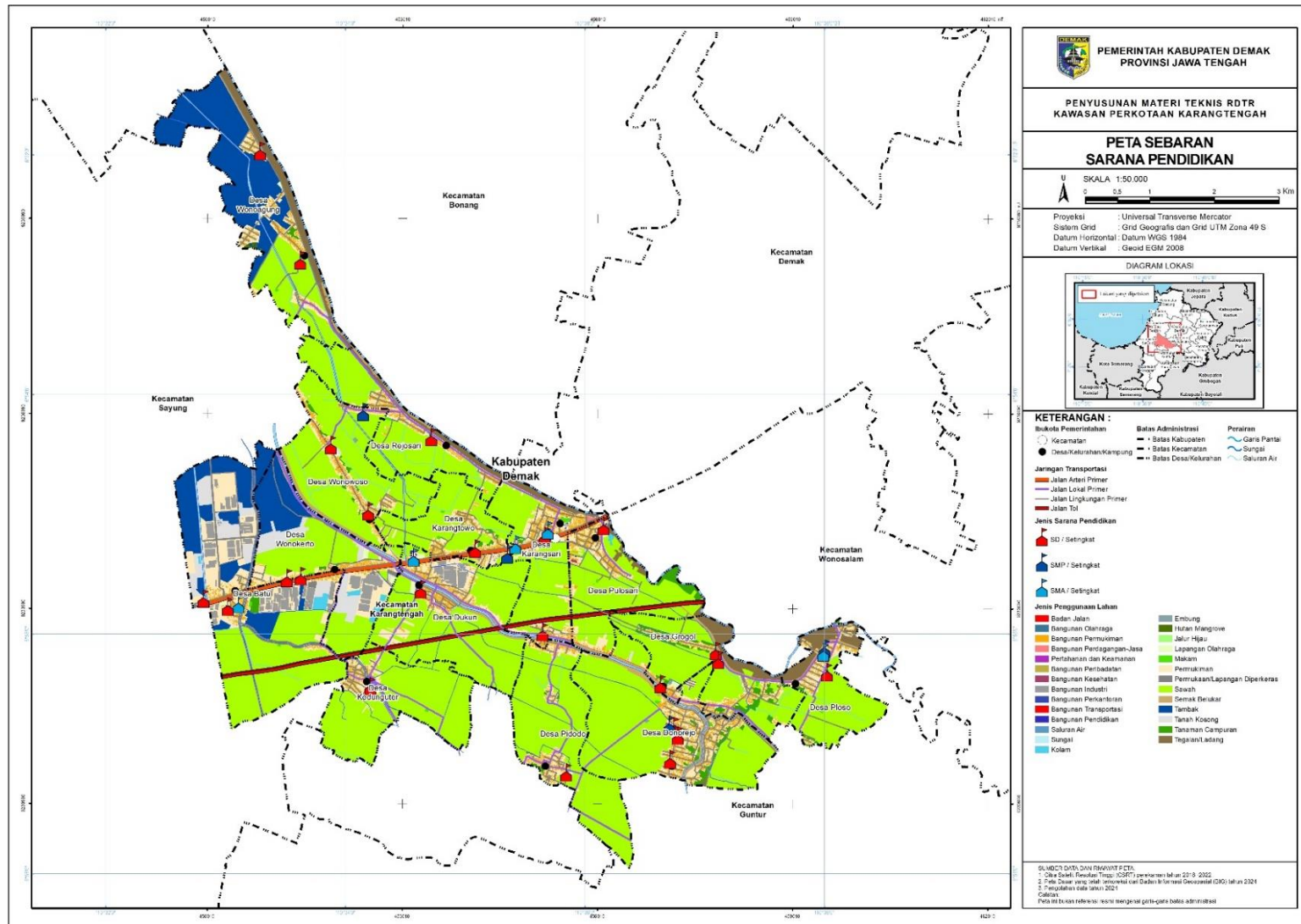
Masjid di Desa Pulosari



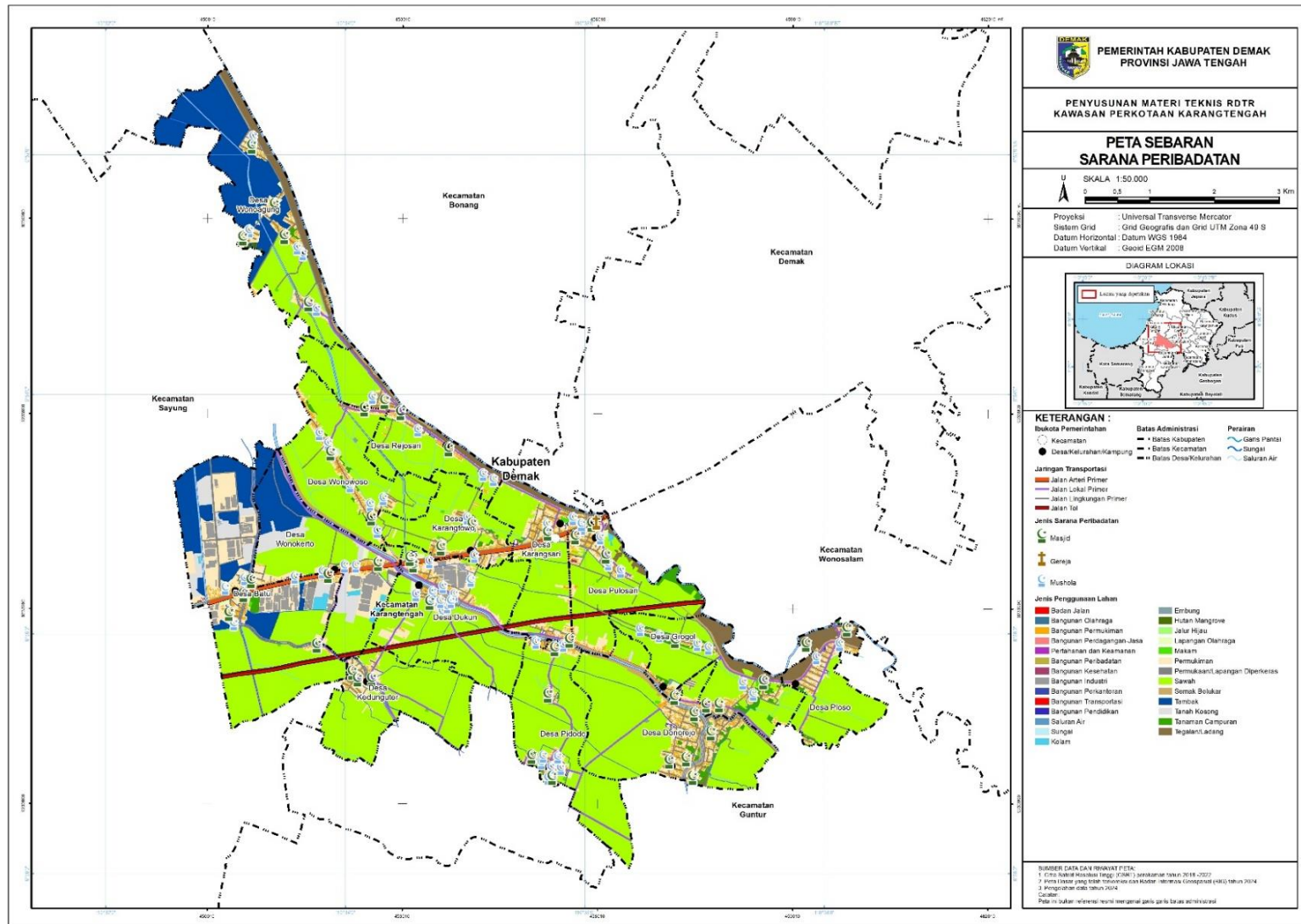
(c)

Gereja di Desa Pulosari

Gambar 3.20. Kondisi Sarana Peribadatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.21. Peta Sebaran Sarana Pendidikan Kawasan Perkotaan Karang Tengah



Gambar 3.22. Peta Sebaran Sarana Peribadatan Kawasan Perkotaan Karang Tengah

C. SARANA KESEHATAN

Berdasarkan kajian terkait ketersediaan sarana kesehatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah, diketahui bahwa terdapat 1 unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, 6 unit Apotek, 6 unit Poliklinik/Balai Pengobatan, 11 unit Praktek Dokter/Bidan, dan 1 unit Rumah Sakit. Berikut adalah sebaran dan jumlah ketersediaan sarana kesehatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.32.
Jumlah Ketersediaan Sarana Kesehatan Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SARANA KESEHATAN (UNIT)					
		PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	APOTEK	POLIKLINIK/ BALAI PENGOBATAN	PRAKTEK DOKTER/BIDAN	RUMAH SAKIT
1	Pidodo	0	0	0	0	0	0
2	Donorejo	0	0	0	1	1	0
3	Grogol	0	1	0	0	1	0
4	Ploso	0	0	0	0	1	0
5	Pulosari	0	0	3	1	0	1
6	Karangsari	1	0	1	1	2	0
7	Karangtowo	0	0	0	0	1	0
8	Dukun	0	0	0	1	0	0
9	Kedunguter	0	0	0	0	0	0
10	Batu	0	1	0	0	0	0
11	Wonokerto	0	0	1	2	2	0
12	Wonowoso	0	0	1	0	1	0
13	Rejosari	0	0	0	0	1	0
14	Wonoagung	0	0	0	0	1	0
Kawasan Perkotaan Karangtengah		1	2	6	6	11	1

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



(a)
Klinik di Desa Karangsari



(b)
Klinik di Desa Donorejo



(c)
Puskesmas di Desa Karangsari



(d)
Puskesmas Pembantu di Desa Grogol



(e)
Praktek Bidan di Desa Grogol



(f)
Rumah Sakit Charlie di Desa Pulosari

Gambar 3.23. Kondisi Sarana Kesehatan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

D. SARANA PERDAGANGAN DAN JASA

Berdasarkan kajian terkait ketersediaan sarana perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Karangtengah, diketahui bahwa terdapat 1 kelompok pertokoan, 1 pasar (bangunan permanen), 2 pasar (bangunan semi permanen), 10 minimarket/swalayan, 1 restoran/rumah makan, dan 286 warung/kedai makanan. Berikut adalah sebaran dan jumlah ketersediaan sarana perekonomian di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.33.
Jumlah Ketersediaan Sarana Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	SARANA PEREKONOMIAN					
		KELOMPOK PERTOKOAN	PASAR (BANGUNAN PERMANEN)	PASAR (BANGUNAN SEMI PERMANEN)	MINIMARKET/ SWALAYAN	RESTORAN/ RUMAH MAKAN	WARUNG/KEDAI MAKANAN
1	Pidodo	0	0	0	0	0	10
2	Donorejo	0	0	0	1	0	30
3	Grogol	0	0	0	0	0	10
4	Ploso	0	0	0	0	0	15
5	Pulosari	0	0	0	3	0	22
6	Karangsari	1	1	1	3	0	20
7	Karangtowo	0	0	0	1	1	19
8	Dukun	0	0	0	0	0	21
9	Kedunguter	0	0	0	0	0	25
10	Batu	0	0	0	1	0	43
11	Wonokerto	0	0	0	0	0	39
12	Wonowoso	0	0	1	1	0	21
13	Rejosari	0	0	0	0	0	7
14	Wonoagung	0	0	0	0	0	4
Kawasan Perkotaan Karangtengah		1	1	2	10	1	286

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



(a)

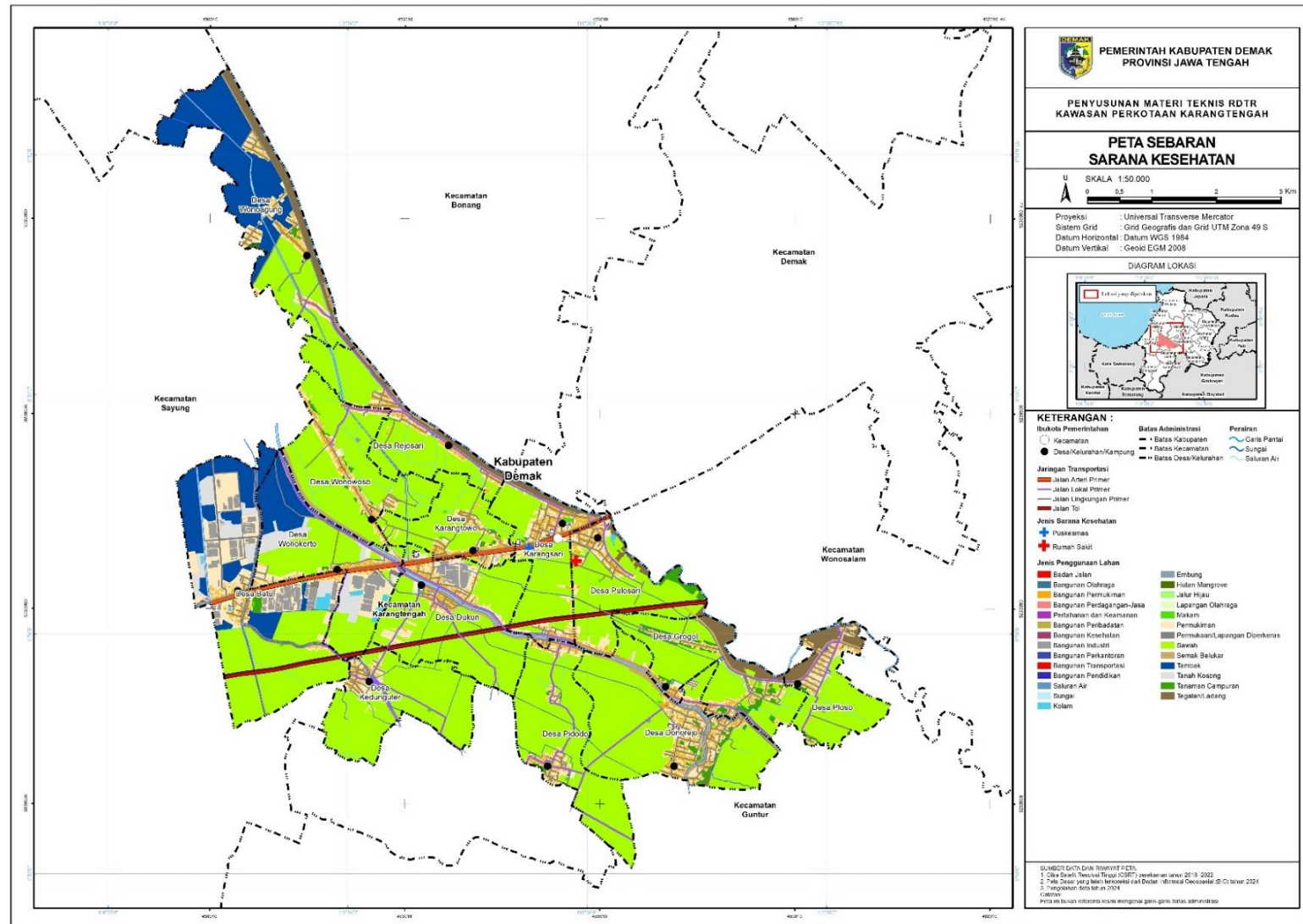
Pasar Buyaran di Desa Karangsair



(b)

Bank di Desa Karangsari

Gambar 3.24. Kondisi Sarana Perdagangan dan Jasa di Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.25. Peta Sebaran Sarana Kesehatan Kawasan Perkotaan Karang Tengah

3.4.2 KONDISI PRASARANA WILAYAH

A. JARINGAN JALAN

Jaringan jalan pada Kawasan Perkotaan Karangtengah terdiri atas beberapa kelas jalan, meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan, serta terdapat jalan tol dan jaringan jalur kereta api (KA) antarkota yang melintasi Kawasan Perkotaan Karangtengah. Adapun beberapa jaringan jalan yang melewati Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34.
Ketersediaan Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	JARINGAN JALAN	DESA/KELURAHAN	PANJANG (M)
1	Arteri Primer	Batu	2.167,47
		Dukun	468,30
		Karangsari	1.345,67
		Karangtowo	1.284,42
		Pulosari	198,54
		Wonokerto	882,18
2	Jalan Lokal Primer	Donorejo	3.827,40
		Grogol	1.988,82
		Karangsari	929,58
		Karangtowo	145,09
		Pidodo	1.088,28
		Pulosari	1.352,88
		Wonokerto	353,23
		Wonowoso	2.394,36
3	Jalan Lingkungan	Batu	12.936,80
		Donorejo	14.630,03
		Dukun	12.099,30
		Grogol	9.518,56
		Karangsari	9.277,65
		Karangtowo	6.391,08
		Kedunguter	5.329,18
		Pidodo	5.647,61
		Ploso	6.015,89
		Pulosari	6.783,58
		Rejosari	8.166,71
		Wonoagung	14.118,54
		Wonokerto	6.626,64
		Wonowoso	7.032,64
4	Jalan Tol	Batu	1.825,00
		Dukun	1.928,36
		Grogol	78,58
		Karangsari	1.022,21
		Kedunguter	340,16
		Pulosari	1.996,46
		Wonokerto	376,28
5	Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antarkota	Batu	2.037,94
		Dukun	1.040,72
		Karangsari	1.445,69
		Karangtowo	697,53
		Pulosari	109,09
		Wonokerto	1.007,27

Sumber: RTRW Kabupaten Demak, diolah 2024



Gambar 3.26. Kondisi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan Karangtengah

B. JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN

Kawasan Perkotaan Karangtengah memiliki jaringan listrik yang berfungsi sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung untuk mendistribusikan energi listrik dari sumber pembangkitan ke konsumen akhir. Tujuan utama dari jaringan listrik adalah menyediakan pasokan listrik yang stabil, aman, dan efisien kepada rumah tangga, industri, komersial, dan sektor publik lainnya. Ketersediaan jaringan energi di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Gardu Induk. Berikut ini adalah tabel ketersediaan jaringan energi di Kawasan Perkotaan Karangtengah.

Tabel 3.35.
Ketersediaan Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	JARINGAN ENERGI	DESA/KELURAHAN	PANJANG (M)
1	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan	Batu	2.038,36
		Dukun	1.040,72
		Karangsari	1.449,83
		Karangtowo	697,53
		Pulosari	109,09
		Wonokerto	1.007,27
2	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Batu	1.562,99
		Karangsari	63,34
		Karangtowo	953,73
		Rejosari	488,20
		Wonoagung	470,52
		Wonokerto	1.381,88
3	Gardu Induk	Wonowoso	1.209,60
		Kedunguter	-

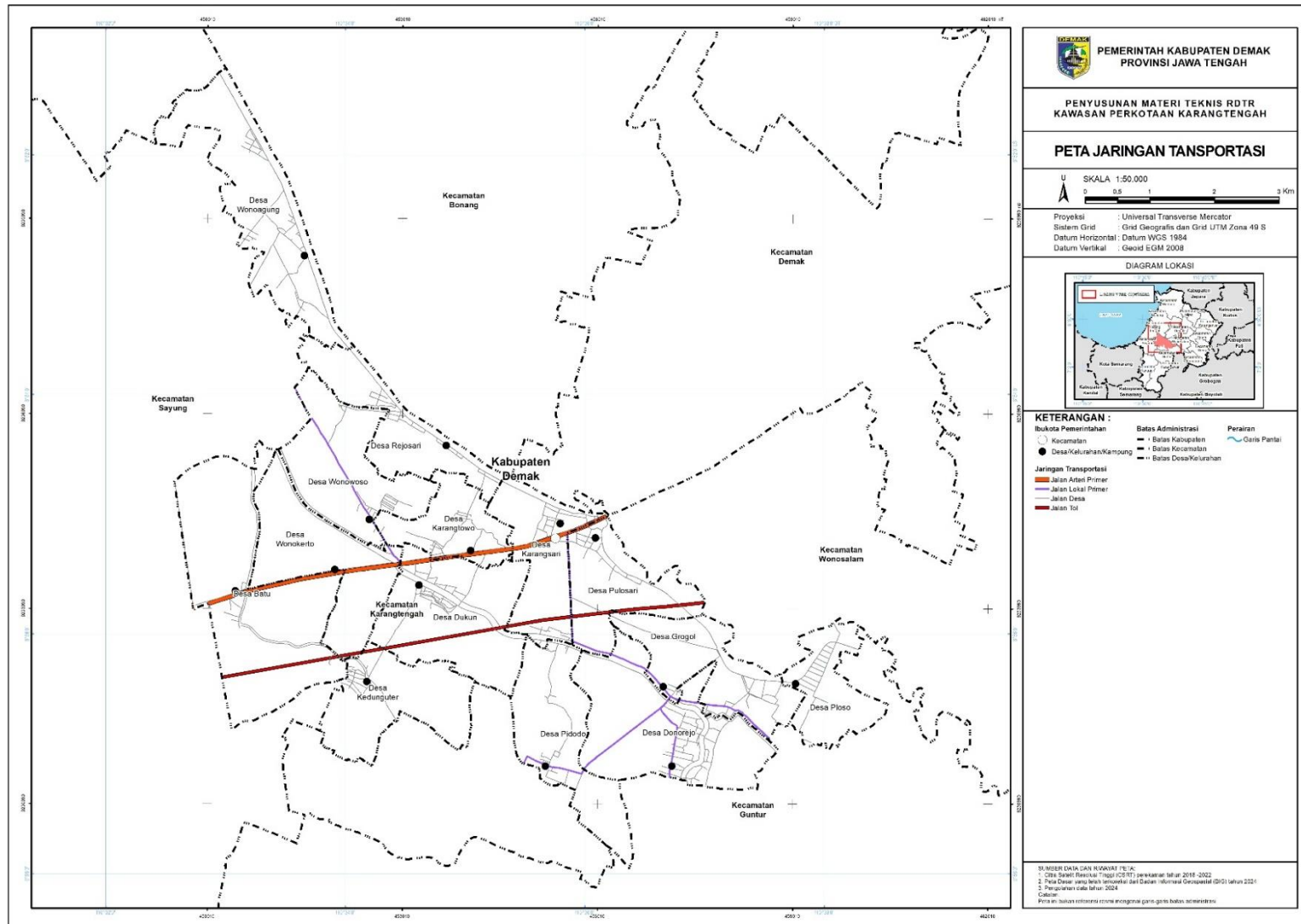
Sumber: RTRW Kabupaten Demak, diolah 2024

Terkait dengan jaringan energi/kelistrikan juga berhubungan dengan ketersediaan listrik bagi penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan data pengguna listrik, seluruh desa/kelurahan di Kawasan Perkotaan Karangtengah telah terlayani oleh jaringan listrik. Berikut ini adalah data pengguna listrik di Kawasan Perkotaan Karangtengah tahun 2021.

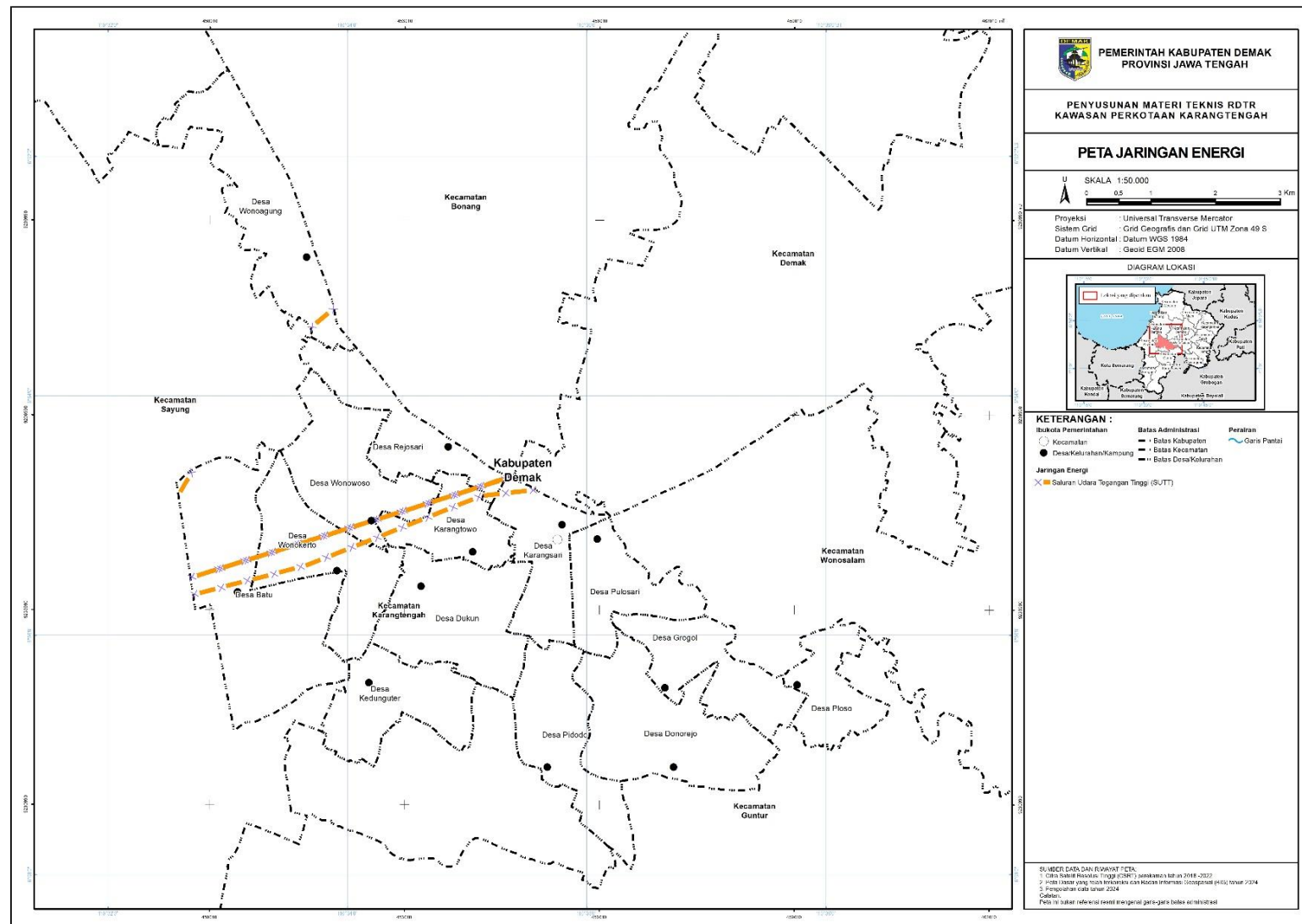
Tabel 3.36.
Pengguna Listrik Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	PENGGUNA LISTRIK (JIWA)		
		PLN	NON PLN	JUMLAH
1	Pidodo	1.358	0	1.358
2	Donorejo	2.660	0	2.660
3	Grogol	1.152	0	1.152
4	Ploso	879	0	879
5	Pulosari	1.358	0	1.358
6	Karangsari	1.973	0	1.973
7	Karangtowo	1.052	0	1.052
8	Dukun	1.779	0	1.779
9	Kedunguter	1.091	0	1.091
10	Batu	1.688	0	1.688
11	Wonokerto	1.137	0	1.137
12	Wonowoso	1.876	0	1.876
13	Rejosari	1.181	0	1.181
14	Wonoagung	1.355	0	1.355
Kawasan Perkotaan Karangtengah		20.539	0	20.539

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



Gambar 3.27. Peta Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.28. Peta Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Karang Tengah

C. JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Jaringan sumber daya air yang ada di Kawasan Perkotaan Karangtengah berfungsi sebagai sistem alami atau buatan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, seperti sungai, danau, waduk, saluran irigasi, dan infrastruktur terkait lainnya. Jaringan ini bertujuan untuk mengelola dan mendistribusikan air secara efisien untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan lingkungan.

Ketersediaan jaringan sumber daya air yang ada di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa jaringan irigasi primer dan infrastruktur sumber daya air lainnya seperti bendungan. Jaringan ini berfungsi sebagai sistem yang dirancang untuk mengatur dan mendistribusikan air kepada lahan pertanian atau area yang membutuhkan pasokan air tambahan. Fungsi utama jaringan irigasi adalah untuk memastikan pasokan air yang cukup dan teratur kepada tanaman, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.

Tabel 3.37.
Ketersediaan Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Perkotaan Karangtengah

NO	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	DESA/KELURAHAN	PANJANG (M)
1	Jaringan Irigasi Primer	Batu	6.991,35
		Dukun	546,86
		Grogol	1.996,49
		Karangsari	2.447,33
		Karangtowo	3.819,72
		Kedunguter	775,44
		Pulosari	2.232,49
		Rejosari	1.109,15
		Wonoagung	213,75
		Wonokerto	1.211,99
		Wonowoso	2.268,23
2	Bendungan	Wonokerto	-

Sumber: RTRW Kabupaten Demak, diolah 2024

D. JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Kawasan Perkotaan Karangtengah memiliki jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan sistem komunikasi sehingga memungkinkan pertukaran informasi, data, suara, dan gambar antara pengguna yang berbeda, baik secara lokal maupun jarak jauh. Jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dalam menghubungkan orang-orang, perangkat, dan layanan komunikasi di seluruh dunia. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel, jaringan nirkabel, jaringan satelit, jaringan komputer, dan internet. Ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Karangtengah berupa:

1. Jaringan Tetap yang melintasi beberapa desa/kelurahan diantaranya adalah Desa Batu, Desa Donorejo, Desa Dukun, Desa Grogol, Desa Karangsari, Desa Karangtowo, Desa Kedunguter, Desa Pidodo, Desa Pulosari, Desa Wonokerto, dan Desa Wonowoso sepanjang 26.059,61 meter.
2. Jaringan Bergerak Seluler yang melintasi jalan Arteri Primer Kawasan Perkotaan Karangtengah dan beberapa desa/kelurahan diantaranya Desa Rejosari, Desa Kedunguter, Desa Pidodo, dan Desa Donorejo.

Berikut adalah rincian sebaran lokasi Menara *Base Transceiver Station* (BTS) di Kawasan Perkotaan Karangtengah

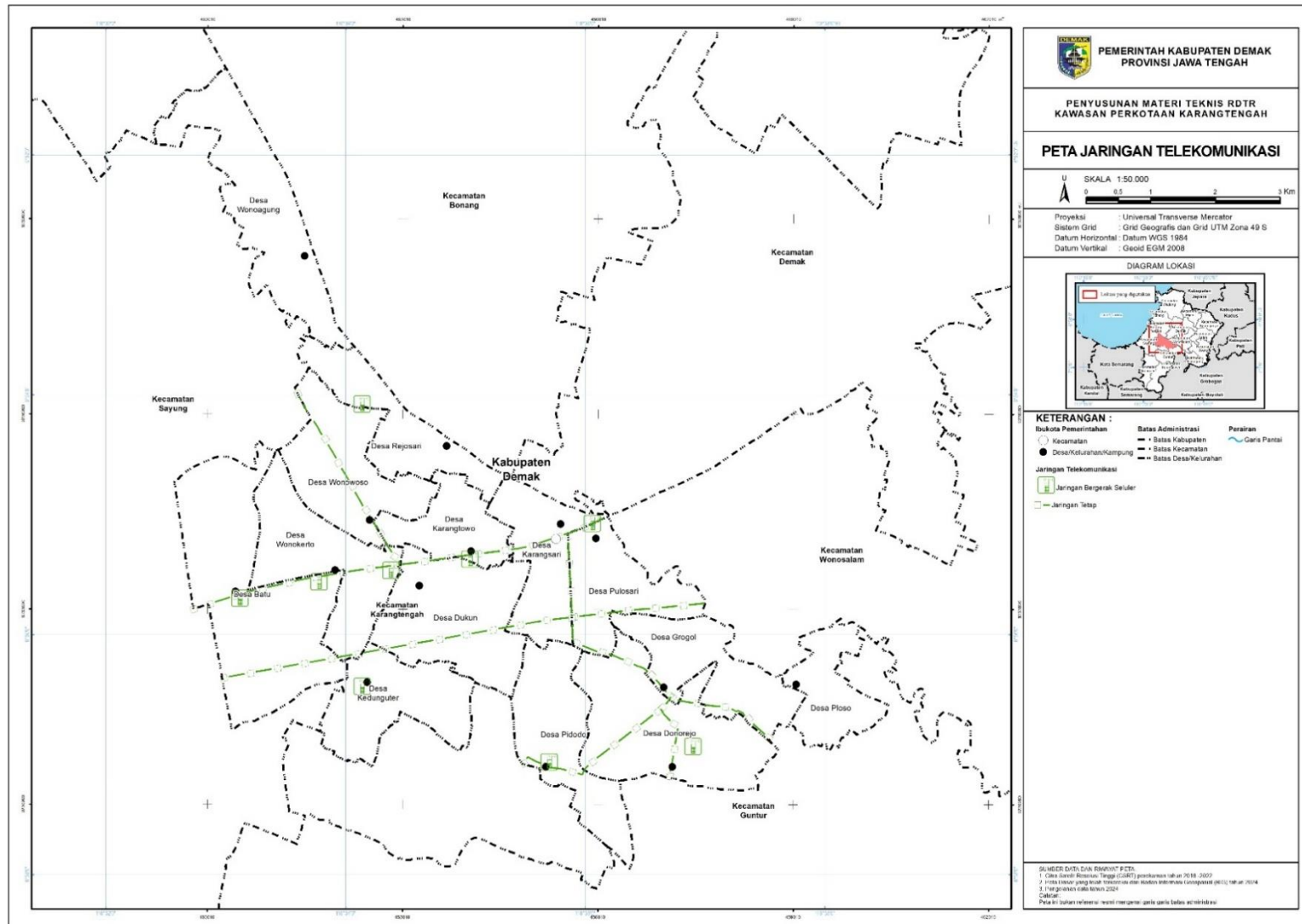
Tabel 3.38.
Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Karangtengah Tahun 2021

NO	DESA/KELURAHAN	SARANA KOMUNIKASI	
		MENARA BTS	OPERATOR LAYANAN KOMUNIKASI TELEPON SELULER
1	Pidodo	0	5
2	Donorejo	3	5
3	Grogol	0	5
4	Ploso	0	5
5	Pulosari	1	6
6	Karangsari	1	5
7	Karangtowo	1	5
8	Dukun	0	5
9	Kedunguter	0	5
10	Batu	5	6
11	Wonokerto	1	5
12	Wonowoso	0	5
13	Rejosari	1	5
14	Wonoagung	0	5
Kawasan Perkotaan Karangtengah		13	72

Sumber: Kecamatan Karangtengah dalam Angka, 2024



Gambar 3.29. Peta Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Perkotaan Karangtengah



Gambar 3.30. Peta Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Karang Tengah

E. JARINGAN AIR MINUM

Jaringan air minum yang ada di Kawasan Perkotaan Karantengah berfungsi sebagai sistem yang dirancang untuk mendistribusikan air bersih dari sumber air ke rumah-rumah, bangunan, dan fasilitas lainnya dalam suatu daerah atau komunitas. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses mudah dan aman terhadap air minum yang layak konsumsi bagi penduduk.

Kebutuhan air disalurkan oleh PDAM Kabupaten Demak pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat jumlah air yang disalurkan sebesar 9,7 juta m³. Jumlah pelanggan tahun 2020 sebanyak 58.753 pelanggan dan nilai 43,52 miliar rupiah. Beberapa desa yang terlayani PDAM Kab. Demak di Kecamatan Karantengah tersebar di 3 desa yaitu Desa Karangsari, Desa Pulosari, dan Desa Karantowo dengan mencapai 1.274 pelanggan atau sekitar 1,82% dari total penduduk di Kecamatan Karantengah. Sedangkan terkait pelayanan air bersih oleh Pamsimas di Kecamatan Karantengah mencapai 3.401 jiwa.

Tabel 3.39.
Jumlah Pelanggan Pemakaian Air Minum pada Perumda Air Minum
Kabupaten Demak Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PELANGGAN PDAM (RUMAH TANGGA)	PELANGGAN PAMSIMAS (RUMAH TANGGA)
1	Mranggen	175.722	9.829	16.904
2	Karangawaen	94.653	1.307	43.921
3	Guntur	86.122	98	9.719
4	Sayung	105.712	0	34.534
5	Karantengah	68.781	1.274	3.401
6	Bonang	106.721	5.826	9.903
7	Demak	110.165	18.740	7.619
8	Wonosalam	84.662	10.108	4.409
9	Dempet	59.689	0	17.028
10	Kebonagung	41.560	0	14.496
11	Gajah	51.735	0	15.433
12	Karanganyar	77.535	574	8.631
13	Mijen	58.287	760	11.619
14	Wedung	82.621	10.237	5.857
Kabupaten Demak		1.203.956	58.753	203.474

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Demak, 2021

F. JARINGAN PERSAMPAHAN

Kawasan Perkotaan Karantengah memiliki jaringan persampahan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan sistem yang terorganisir untuk mengelola sampah. Ini mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Tujuan utama dari jaringan persampahan adalah mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ketersediaan sistem jaringan persampahan di Kawasan Perkotaan Karantengah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Desa Donorejo.

BAB IV

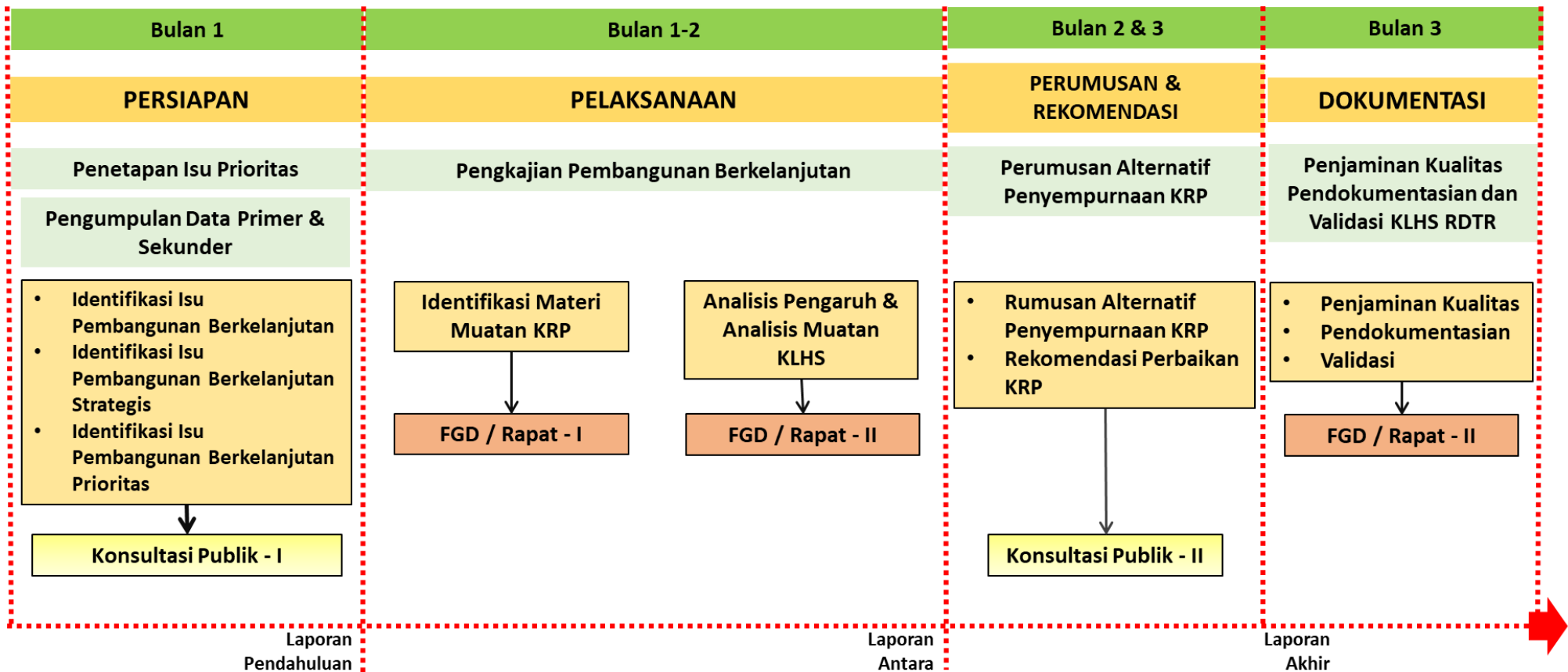
METODOLOGI DAN KERANGKA PROSES PELAKSANAAN

4.1. METODOLOGI PROSES PELAKSANAAN KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN KARANGTENGAH

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan pelaksanaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah ini, dilakukan beberapa tahapan yang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan pekerjaan
2. Pengkajian pembangunan berkelanjutan
3. Analisis isu pembangunan berkelanjutan prioritas
4. Perumusan dan rekomendasi
5. Perumusan alternatif dan penyempurnaan krp
6. Dokumentasi
7. Penjaminan kualitas pendokumentasian dan validasi klhs rdtr

Untuk lebih jelasnya metode proses pelaksanaan dapat dilihat pada skema dan penjelasan di bawah ini.



Gambar 4.1. Metodologi Proses Pelaksanaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah

4.2. METODE PENGUMPULAN DATA

Kegiatan pengumpulan data (survey) yang dilakukan mencakup 2 jenis kegiatan yang didasarkan pada jenis datanya, yaitu:

4.2.1. SURVEI PRIMER

Survey primer ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang bersifat primer, yaitu data atau informasi yang didapat langsung dari lapangan. Teknik untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan konsultasi publik, observasi, pengukuran, perhitungan serta wawancara. Kegiatan ini terutama bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan yang spesifik di wilayah studi.

4.2.2. SURVEI SEKUNDER

Survey sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh dinas-dinas maupun instansi sektoral yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, *kuesioner* maupun dengan mereproduksi dari data yang ada.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan KLHS ini adalah:

1. Data dan informasi dapat diperoleh dari pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
2. Data dan informasi dapat berupa data sekunder maupun primer;
3. Data dan informasi yang dikumpulkan yang diperlukan saja, khususnya yang terkait dengan isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati;
4. Verifikasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjamin keabsahannya;
5. Informasi sekunder dapat digabungkan dengan data primer yang dikumpulkan melalui diskusi dengan masyarakat lokal yang memahami wilayah studi, misalnya dengan cara observasi lapangan, wawancara langsung, diskusi dengan stakeholder atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dan survei.

Kebutuhan data dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangtengah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kebutuhan Data KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah

No.	Kebutuhan Data	Instansi
1.	Dokumen perencanaan (RTRW, RDTR, dll)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karangtengah
2.	Materi Teknis RTRW dan RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karangtengah
3.	Jumlah timbulan sampah cakupan pelayanan dan prasarana persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
4.	Data kebutuhan dan penggunaan air domestik dan non – domestik (masterplan)	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
5.	Data jaringan air bersih (masterplan)	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
6.	Data sarpras air limbah dan jaringannya (masterplan)	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
7.	Strategi Sanitasi Kawasan Perkotaan Karangtengah	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
8.	Dokumen D3TLH Kawasan Perkotaan Karangtengah	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah

No.	Kebutuhan Data	Instansi
9.	Dokumen SLHD Kawasan Perkotaan Karangtengah	Dinas Lingkungan Hidup Karangtengah
10.	Jumlah Produksi Padi (ton/tahun)	Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan Karangtengah
11.	Angka Konsumsi Beras (ton/tahun)	Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan Karangtengah
12.	Data sebaran dan luasan sawah LP2B (sawah lestari)	Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan Karangtengah
13.	Daerah pelayanan air bersih	PDAM
14.	Kebutuhan air bersih domestik	PDAM
15.	Kebutuhan air bersih non domestik	PDAM
16.	Sumber air baku yang digunakan	PDAM
17.	SHP peta ekoregion Kawasan Perkotaan Karangtengah	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
18.	Kecamatan Dalam Angka	BPS
19.	Konsultasi Publik	Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Dinas terkait
20.	Wawancara melalui tanya jawab langsung ataupun pelaksanaan diskusi/FGD	Masyarakat, Dinas terkait, praktisi

Sumber: Tim Penyusun KLHS, 2024

Data dan informasi yang diperoleh dari survei primer dan sekunder, biasanya masih bersifat kasar, yang mana masih diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut sehingga data dan informasi yang disajikan lebih informatif serta mudah dibaca dan dipahami. Adapun teknik pengolahan dan penyusunan data didasarkan pada jenis dan sifat data bersangkutan, antara lain :

1. Data yang sifatnya kuantitatif, diolah dan disusun dengan tabulasi, yang dalam penyajian akhir berupa tabel-tabel, grafik maupun uraian.
2. Data yang bersifat kualitatif, diolah dan disusun secara deskriptif, yaitu berupa uraian yang menerangkan keadaan data tersebut.
3. Data yang sifatnya menunjukkan letak, diolah dan disusun dengan menggunakan peta-peta data.
4. Data yang sifatnya menunjukkan suasana, diolah serta disusun yang berupa foto-foto serta uraian-uraian.

4.3. METODE ANALISIS

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1. PERUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan untuk menentukan isu-isu yang pembangunan berkelanjutan strategis yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah literatur, curah pendapat dengan POKJA KLHS dan konsultasi publik.
- b) Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan melalui tahapan
 - Melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan isu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan lintas waktu.
 - Konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman.
 - Konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah tabulasi yang digunakan dalam penilaian isu pembangunan berkelanjutan. Pemilihan isu pembangunan berkelanjutan dipilih dari isu pembangunan berkelanjutan yang telah dipusatkan dan memenuhi nilai 2 – 4 dari 4 kriteria di bawah.

Tabel 4.2.
Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan

No.	Isu PB	Lintas Sektor	Lintas Wilayah	Lintas Pemangku Kepentingan	Lintas Waktu	Penilaian
1.	Isu PB yang telah dipusatkan 1					4
2.	Isu PB yang telah dipusatkan 2,	-	-		-	1
3.	dst ...					

- c) Telaah cepat hasil pelingkupan yang mempertimbangkan unsur paling sedikit:
- karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (misalnya dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang, dan peta tutupan lahan
 - tingkat pentingnya potensi dampak
 - keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan

Berikut adalah tabulasi yang digunakan dalam pemilihan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Sejauh ini muatan RPPLH belum digunakan karena dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki RPPLH. Penilaian terhadap isu pembangunan berkelanjutan strategis adalah yang memiliki nilai antara 3 – 5 berdasarkan pemilihan di bawah.

Tabel 4.3.
Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Deskripsi Isu PB	Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	RPPLH	KLHS diatasnya	Penilaian
1.	Isu PB 1						-	-	4
2.	Isu PB 2			-	-		-	-	2
3.	Dst...								

- d) Membuat perkiraan tentang:
- Tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak.
 - keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-akibatnya
- e) Memutuskan isu yang strategis dan prioritas yang telah dikonfirmasi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi publik.

Berikut adalah tabel untuk menilai isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan deskripsi dan pembobotan terhadap 10 muatan yang meliputi (1) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) dampak terhadap lingkungan hidup, (3) jasa ekosistem, (4) cakupan wilayah bencana, (5) penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam, (6) ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, (7) peningkatan kerentanan dan adaptasi

perubahan iklim, (8) peningkatan jumlah penduduk miskin, (9) peningkatan resiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan (10) ancaman kawasan tertentu secara tradisional dan masyarakat adat.

Penilaiannya menggunakan angka 1 – 5 yang menunjukkan **tidak berpengaruh** (1) sampai dengan **sangat berpengaruh** (5). Isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas dipilih dari total nilai yang besar sampai dengan terkecil. Penilaian pada masing-masing muatan didahului deskripsi untuk masing-masing isu pembangunan berkelanjutan strategis dan perkiraan dampaknya.

Tabel 4.4.
Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Daftar Isu PB Strategis	D3TLH	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Bencana	Mutu SDA	Biodiversity	Perubahan Iklim	Masy. Miskin	Kesehatan Masyarakat	Kawasan Adat
Isu PB strategis 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Isu PB strategis 2	5	5	4	4	4	3	4	3	1	1
Dst ...										

4.3.2. KETERKAITAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM (KRP) DENGAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Keterkaitan KRP dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Metode analisis yang digunakan adalah metode tabulasi silang, dengan bagian vertikal adalah KRP RDTR sedangkan bagian horizontal adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan Karangtengah yang telah didapatkan dari hasil konsultasi publik atau FGD (*Focus Group Discussion*). Kemudian untuk penilaian setiap KRP dengan tiga nilai sebagai berikut:

- + = KRP memberikan pengaruh baik (positif) terhadap isu strategis PB
- 0 = KRP tidak terkait dengan isu strategis PB
- = KRP memberikan pengaruh buruk (negatif) terhadap isu strategis PB

Tabel 4.5.
Keterkaitan KRP dengan Isu Strategis

Kode KRP	KRP	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan					
		Isu 1	Isu 2	Isu 3	Isu 4	Isu 5	Isu dst..
KRP PR-1	Rencana pola ruang						
	Rencana zona lindung						
	A. Perlindungan Setempat						
	B. RTH						

4.3.3. ANALISIS KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG TERDAMPAK

Sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016 terdapat enam muatan kajian dalam KLHS yaitu 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, 2) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, 3) kinerja layanan/jasa ekosistem, 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tabel 4.6.
Muatan Kajian KLHS

No.	Muatan	Penjelasan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik- teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau resiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau resiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi <i>Environmental Risk Assessment</i>)
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama di dalamnya adalah yaitu: a. Layanan/fungsi penyedia (<i>provisioning services</i>): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll. b. Layanan/fungsi pengatur (<i>regulating services</i>): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll. c. Layanan/fungsi budaya (<i>cultural services</i>): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis- jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianya.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara: a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya;

No.	Muatan	Penjelasan
		b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji kerentanan dan resiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi: - Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi - Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya - Pemeliharaan dan pengembangbiakan - Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya - Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi : - Interaksi jenis tumbuhan dan satwa - Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung c. Mengkaji genetik, yang meliputi : - Keberlanjutan sumber daya genetik - Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

4.3.4. PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa:

- a) Perubahan tujuan atau target;
- b) Perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- c) Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- d) Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- e) Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- f) Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g) Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan resiko lingkungan hidup.

Alternatif penyempurnaan dipilih berdasarkan:

- a) Manfaat yang lebih besar;
- b) Resiko yang lebih kecil;
- c) Kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak; dan

- d) Mitigasi dampak dan resiko yang lebih efektif.

Pemilihan alternatif penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) Mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan;
- b) Situasi sosial-politik;
- c) Kapasitas kelembagaan pemerintah;
- d) Kapasitas dan kesadaran masyarakat;
- e) Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia; dan/atau
- f) Kondisi pasar dan potensi investasi.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.3.5. PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM YANG MENINGTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat:

- a) Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- b) Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya.

Rekomendasi perbaikan dapat ditambahkan muatan:

- a) Usulan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang relevan untuk disusun agar
- b) Mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c) Tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

4.3.6. PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KLHS

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan dengan cara :

1. Penilaian bertahap; dan/atau
2. Penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Penilaian mandiri harus mempertimbangkan:

1. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
2. Laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan

Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, penilaian mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasil penjaminan kualitas dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

1. Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
4. Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
8. Ringkasan eksekutif.

4.3.7. VALIDASI KLHS

Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses validasi dilakukan dengan mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah kabupaten/kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas. Permohonan validasi melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS;
3. Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
4. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

Persetujuan validasi KLHS paling sedikit memuat : kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi. Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

BAB V

RENCANA KERJA

5.1. TAHAPAN PELAKSANAAN

Proses Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

A. TAHAPAN PERSIAPAN

- a. Persiapan awal pelaksanaan termasuk pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Kajian awal data sekunder, mencakup kebijakan atau peraturan terkait penyusunan KLHS yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - Penyimpulan data awal;
 - Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyiapan rencana kerja rinci;
 - Penyiapan perangkat survey serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan;

B. TAHAP PENDAHULUAN

Merupakan pelaporan hasil pekerjaan tahap pertama. Dalam tahap ini dilakukan Konsultasi Publik Pertama untuk identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, strategis dan prioritas. Hasil dari Tahap Pendahuluan meliputi :

- a. Gambaran umum wilayah
- b. Hasil studi pendahuluan sebagai kajian awal terhadap kebijakan terkait wilayah perencanaan.
- c. Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan.
- d. Rencana kerja pelaksanaan.

- e. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis dan Prioritas.
- f. Perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan saat proses pengumpulan data dan informasi.

Hasil dari draft laporan pendahuluan akan didiskusikan bersama dengan tim teknis untuk kemudian diperbaiki dan difinalkan menjadi laporan pendahuluan.

C. TAHAP AKHIR

Merupakan laporan tahap kedua atau tahap akhir. Laporan akhir merupakan laporan rencana. Dalam tahap akhir penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah dilakukan pengidentifikasian Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang ada di Kawasan Perkotaan Karangtengah serta perumusan alternatif penyempurnaan KRP Rancangan Perda RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah dan perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan. Hasil dari tahap akhir meliputi :

- a. Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
- b. Analisis pengaruh muatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
- c. Alternatif penyempurnaan KRP RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah
- d. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah

Hasil dari draft laporan akhir akan didiskusikan bersama dengan tim teknis untuk kemudian diperbaiki dan difinalkan menjadi laporan akhir.

5.2. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangtengah dilaksanakan selama 45 (Empat puluh lima) hari sesuai dengan berita acara rapat terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian kerja. Tahapan pekerjaan secara garis besar sebagai berikut :

1. Konsultasi Publik I: identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis dan penetapan isu prioritas

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangtengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Karangtengah

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2	
		I	II	III	IV	I	II
A.	TAHAPAN KEGIATAN						
A.1	Pendahuluan						
1	Penyiapan berkas administrasi						
2	Koordinasi Internal Tim						
3	Penyusunan metodologi dan rencana kerja						
4	Penyusunan Laporan Pendahuluan						
5	Survey kebutuhan data						
A.2	Akhir						
1	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan						
2	Analisa Isu Pembangunan berkelanjutan Paling Strategis						
3	Identifikasi KRP Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup						
4	Penyusunan Alternatif						
5	Penyusunan Rekomendasi dan Pengintegrasian KLHS ke dalam Penyusunan RDTR						
B.	DISKUSI/PEMBAHASAN						
1	Laporan Pendahuluan						
2	Konsultasi Publik 1 : Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan, Strategis, Prioritas						
3	Laporan Akhir						
C.	PELAPORAN/OUTPUT						
1	Laporan Pendahuluan						
2	Laporan Akhir						
3	Soft File						

5.3. KELUARAN DAN PELAPORAN

Sistem pelaporan pada pekerjaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangtengah ini terdiri dari:

A. LAPORAN PENDAHULUAN

Laporan Pendahuluan memuat:

- a. Latar belakang, tujuan KLHS, kegiatan dan metodologi, hambatan dan kunci keberhasilan. Profil masing-masing lokasi KLHS RDTR yang berisi: kondisi geografis, fisik, dan lingkungan; kondisi ekonomi; dan kondisi sosial-budaya;

B. LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
- b. Perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis; dan
- c. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas.
- d. Identifikasi Kebijakan, Rencana, dan atau Program yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
- e. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- f. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- g. Pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strategis ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.